PMII

MODUL PKD
PELATIHAN KADER DASAR

PENGURUS KOMISARIAT
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
AL-QOLAM MALANG

Dzikir, Fikir, dan Amal Sholeh - Taqwa, Intelektual, dan Profesional - Kejujuran, Kebenaran, dan Keadilan

MENYEBARKAN ISLAM YANG DAMAI & TOLERAN

KATA PENGANTAR

Pelatihan Kader Dasar atau yang disingkat dengan PKD merupakan proses kaderisasi formal PMII setelah mengikuti Masa Penerimaan Anggota Baru (MAPABA). Oleh karena itu tahapan ini adalah fase lanjutan dengan persoalan dalam nilai-nilai PMII itu sendiri. Dalam Gerakan yang loyalitas dan militansi tak diragukan lagi (sudah tuntas). Sehingga fokus garapannya adalah membentuk kader-kader PMII yang lebih dari militan, mempunyai komitmen moral, dan dasar-dasar kemampuan teoritis maupun praksis untuk mengaplikasikan "*amar ma'ruf nahi munkar".*

Oleh sebab itu, perlu suatu proses tansformasi ilmu, penanaman intelektual, transmisi kaderisasi demi mempersiapkan kader untuk mewujudkan perubahan yang lebih baik. Dan harapan terbesar bahwa dengan adanya Pelatihan Kader Dasar, PMII akan menumbuhkan kader-kader berjiwa responsif dan solutif yang berlandaskan faham **Ahlussunnah Wal Jamaah**.

Dan modul ini merupakan materi PKD yang dirangkum dari berbagai narasumber, semoga bermanfaat bagi sahabat-sahabati.

Serta terimakasih kepada seluruh Panitia Pelaksana yang telah berpatisipasi dalam tersusun nya modul sederhana ini. Mohon maaf jika ada beberapa redaksi yang salah atau kurang kata dan kalimat serta yang kurang dipahami.

Wallahul Muwaffieq Ilaa Aqwamieth Thorieq

Malang, 01 Mei 2016

Tim Penyusun
Panitia Sttering Committee (SC)
PKD Komisariat PMII Al-Qolam 2016

SEKAPUR SIRIH

Bismillah
Salam Pergerakan!!!

Syukur Alhamdulillah. Saya panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat ridho dan hidayah-Nya kita masih bisa menjalin kembali silaturrahim. Sholawat serta salam saya panjatkan kepada sang revolusioner sejati kita yakni Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, berkat limpahan Perjuangan beliau pula kita mampu membedakan perkara yang tercela dan Terpuji dalam ruang lingkup kehidupan.

Di awal lembaran Modul Pelatihan Kader Dasar (PKD) 2016 Kali ini, yang mana di dalamnya terdapat beberapa materi dasar awal proses kaderisasi formai organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Sedikit atau banyak, sekecil apapun pengalaman baik ilmu, pengetahuan dan apalagi sejarah organisasi itu merupakan arsip karya selama tidak melanggar aturan baik Agama, berbangsa dan bernegara.Materi-materi yang penulis suguhkan adalah buah dari gagasan mendalam perjalanan PMII selama ini. Bahwa hal terbesar yang dilakukan PMII selama ini adalah belajar mempertahankan keidealisan secara realistis terus menerus berakan dengan berbagai dinamikanya sekaligus merajut berbagai komponen sosial dan lingkungan sekitar untuk memperkuat rasa kepedulian kita sebagai Kader PMII khususnya.

Maka dari itu dalam Pelatihan Kader Dasar (PKD) ini bukanlah hanya sekedar kegiatan formalitas semata akan tetapi bagaimana seluruh anggota *mu'takid* yang nantinya menjadi kader *mujahid* bisa mempertahankan tradisi-tradisi ruang gerak PMII itu sendiri dan membuat perubahan khusus nya setiap pribadi kader PMII menjadi lebih baik serta peduli kepada Bangsa, Negara dan Agama. Karena Kegiatan ini merupakan salah satu gerbong masuk untuk mendobrak segala kehidupan di lingkungan sekitar.

Pengalaman dan pengetahuan menjadi sumber gerak kedua PMII yang notabene berbasis kampus. Untuk mencetak kader dan pemimpin yang selaras antara kata dan perbuatan dan menyiapkan kader yang mempunyai kompetensi dan daya saing selaras dengan perkembangan zaman.

Maka dengan awal terbukanya ruang gerak baru ini, Saya Aminullah mewakili Seluruh Pengurus Komisariat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Al-Qolam Cabang Kabupaten Malang, mengharapkan seluruh kader menumbuhkan jiwa-jiwa PMII yang sudah tertanam sejak lama dan segera diaplikasikan dan diimplementasikan lebih khususnya ruang lingkup lingkungan sekitar lebih khususnya pada pribadi sendiri.

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Rumah Juang Demokrasi Malang, 27 April 2016

JADWAL ACARA

Hari, Tgl	Waktu	Kegiatan		Penanggung Jawab
K a m i s – M i n g g u , 0 5 - 0 7 M e i 2 0 1 6	**Kamis, 05 Mei 2016**			
	07:00-08:00	Regristasi Peserta		Panitia
	08:00-08:30	Check-In Peserta dan Undangan		All
	08:30-11:00	Ceremonial:		
		1.	Pembukaan	MC
		2.	Menyanyikan lagu indonesia raya dan mars PMII	Uswatul Hasanah
		3.	Sambutan: a. Ketua Pelaksana b. Ketua Komisariat c. Pengurus Cabang & pembukaan PKD	a. Badrud Tammam b. Aminulloh c. M. Jabir
		4.	Penutup / Do'a	Bahaudin Hamzah
	Time Line PKD 2016			
	11:00-12:00	Sholat Dzuhur		All
	12:00-12:30	Kontrak Forum		SC
	12:30-13:45	Ice Breaking		Fasilitator
	13:45-14:45	Paradigma PMII		Mukhlis El-Fahri
	14:45-15:45	Follow up dan Presentasi Kelompok		Peserta
	15:45-16:30	Ishoma		AII
	16:30-16-45	Ice Breaking		Fasilitator
	16:45-17:45	Strategi & Taktik Pengembangan Organisasi		Ahmad Atho' LH
	17:45-18:00	Follow Up		Peserta
	18:00-18:30	Sholat Maghrib		AII
	18:30-19:00	Presentasi		Peserta
	19:00-19:15	Ice Breaking		Fasilitator
	19:15-20:15	Aswaja Sebagai Manhaj		A. Khufaji Jaufan
	20:15-21:15	Follow Up & Presentasi		Peserta
	21:15-21:45	Ishoma		AII
	21:45-04:30	Kiamat Intelektual		AII

	Jum'at, 06 Mei 2016		
	04:30-06:00	Sholat Shubuh	AII
	06:00-07:00	Senam Pagi	SC
	07:00-07:30	Berhias Ria	AII
	07:30-09.30	Persiapan Pensi Kelompok	Fasilitator
	09:30-10.30	Analisis Sosial	Syamul Arifin Zrt
	10:30-11:15	Praktek Lapangan	Peserta
	11:15-12:30	Ishoma	AII
	12:30-13:30	Follow Up & Presentasi Kelompok	Peserta
	13:30-13:45	Ice Breaking	Fasilitator
	13:45-14:45	Analisis Wacana Kritis	M. Hilal
	14:45-15:45	Follow Up & Presentasi Kelompok	Peserta
	15:45-16:00	Sholat Ashar	All
	16:00-16:15	Ice Breaking	Fasilitator
	16:15-17:15	Manajemen konflik	Husnul Hakim S
	17:15-18:00	Follow Up & Presentasi Kelompok	AII
	18:00-18:45	Ishoma	Peserta
	18:45-19:00	Ice Breaking	Fasilitator
	19:00-21:00	Antopologi Kampus	Moch Jabir
	21:00-21:30	Follow Up & Presentasi Kelompok	Peserta
	21:30-21:45	Ice Breaking	Fasilitator
	21:45-04:30	Kiamat Intelektual	AII
	Sabtu, 07 Mei 2016		
	04:30-06:00	Sholat Subuh	AII
	06:00-07:00	Senam Pagi	SC
	07:00-07:30	Berhias Ria	AII
	07:30-09.30	Persiapan Pensi Kelompok	Fasilitator
	09:30-10.30	Pengelaan Opini & Gerakan Masa	Eko Yusuf W
	10:30-11:30	Follow Up & Presentasi	Peserta
	11:30-11:45	Ice Breaking	Fasilitator
	11:45-12:45	Ishoma	AII
	12:45-14:00	Manajemen Aksi	Yatimul Ainun
	14:00-15:20	Simulasi Aksi	Peserta

	15:20-16:30	Evaluasi Aksi	Fasilitator
	16:30-18:10	Ishoma	AII
	18:10-21:00	Pensi Kelompok	Peserta
	21:00-02:00	Kiamat Intelektual	AII
	Minggu, 08 Mei 2016		
	02:00-04:30	Pembaitan (Pengukuhan)	PC
	04:30-05:00	Ishol	AII
	05:00-07:00	Penutupan + Go Home	PC

DAFTAR ISI

Pendahuluan

KATA PENGANTAR 2

SEKAPUR SIRIH 3

JADWAL ACARA 4

DAFTAR ISI.....7

MATERI PKD

1.1. Paradigma PMII 8

1.2. Strategi Pengembangan Organisasi 14

1.3. Aswaja Dalam Teologi Pembebasan 17

1.4. Analisis Sosial 22

1.5. Analisis Wacana Kritis.....34

1.6. Manejemen Konflik 38

1.7. Antropologi Kampus 49

1.8. Pengelolaan Opini & Gerakan Masa 55

1.9. Manajemen Aksi 63

CATATAN

IDENTITAS NARASUMBER.....67

BIODATA PESERTA 76

SUSUNAN PANITIA PKD 77

PARADIGMA PMII

Oleh: Mukhlis El-Fahri

Paradigma merupakan sesuatu yang vital bagi pergerakan organisasi, karena paradigma merupakan titik pijak dalam membangun konstruksi pemikiran dan cara memandang sebuah persoalan yang akan termanifestasikan dalam sikap dan prilaku organisasi. Disamping itu, dengan paradigma ini pula sebuah organisasi akan menentukan dan memilih nilai-nilai yang universal dan abstrak menjadi khusus dan praksis operasional yang akhirnya menjadi karakteristik sebuah organisasi dan gaya berpikir seseorang.

Konsep pengkaderan yang baik selalu berangkat dari kenyataan real sebuah zaman dan selalu mengarah pada tujuan organisasi. Sehingga kader yang telah dididik oleh organisasi mampu memahami keadaan zamannya, mampu mengambil pelajaran dan mampu mengambil posisi gerak sesuai tujuan organisasi.

Selain itu sebuah konsep pengkaderan yang baik juga senantiasa berorientasi untuk meningkatkan tiga aspek utama, yakni keilmuan, pengetahuan dan keterampil`n. Keimanan mendorong kader untuk berani dan tidak mau tunduk dihadapan segala bentuk kemapanan serta ancaman duniawi. Pengetahuan membekali kader atas keadaan zaman dimana dia bergerak, dan keterampilan merupakan bekal bagi kader agar mampu *survive*sekaligus bergerak di zamannya.

A. Pengertian paradigma (*Paradigm*)

Asal Usul paradigma, secara (etomologi) asal usul kata paradigma berasal dari rumpunan dua bahasa: Paradigma berasal dari kata Yunani yaitu *paraa* dan *deigmaa* yang berarti kaca mata, cakrawala atau horizona, oleh karena itu paradigma dari segi asal kata, pengertian paradigma adalah kacamata memandang terhadap situasai, cara pandang terhadap keyataan atau peristiwa. Atau menafsirfkan keadaan tentang politik, agama, budaya, ekonomi dan pendidikan. Paradigma berhubungan dengan cara ilmu pengetahuan memandang suatu masalah yang muncul dari kenyataan sendiri. (Layla Sugandhi,1999: 13).

Paradigma pertama kali di perkenalkan oleh *Thomas Kuhn,* seorang ahli fisika teoritik konsep paradigma di gunakan untuk menunjukan pola pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan manusia. *Thomas Kuhn* beranggapan bahawa ilmu pengetahuan bersifat revulosioner. Yang di tandai dengan pembongkaran dan penjungkir balikkan pada stuktur paradigma itu

sendiri. Dengan perkataan lain, keberdaan paradigma yang menjadi penggerak dari pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan manusia.

Pengertian paradigma menurut *George Ritner* mengartikan paradigma sebagai apa yang harus dipelajari, persoalan-persoalan apa yang mesti dipelajari, bagaimana seharusnya menjawabnya, serta seperangkat aturan tafsir sosial dalam menjawab persoalan-persoalan tersebut. Maka, jika dirumuskan secara sederhana sesungguhnya paradigma adalah semacam kaca mata untuk melihat, memaknai, menafsirkan masyarakat atau realitas sosial. Tafsir sosial ini kemudian menurunkan respon sosial yang memandu arahan pergerakan.

Berdasarkan pemikiran dan rumusan yang disusun para ahli sosiologi, maka pengertian paradigma dalam masyarakat PMII dapat dirumuskan sebagai titik pijak untuk menentukan cara pandang, menyusun sebuah teori, menyusun pertanyaan, dan membuat rumusan mengenai suatu masalah. Dengan kata lain paradigma merupakan titik tolak dalam mendekati objek kajiannya.

B. Peran dan fungsi paradigma

Dalam ilmu sosial fungsi paradigma adalah untuk membangun suatu teori, guide dalam membangun suatu konstruk pemikiran dan menjadi titik pijak pandangan dalam melakukan analisis. Dengan demikian peran paradigma adalah sangat menentukan karena ia akan menjadi ciri dan karakteristik dari bangunan sebuah teori yang membedakannya dengan bangunan teori lainnya. Dapat dipahami, paradigma yang hendak dipilih PMII akan menjadi karakteristik dari komunitas PMII dalam memberikan analisis, memandang realitas dan menysusun konsep-konsep teoritik atau tentang berbagai persoalan yang ada dalam masyarakat.

C. PENERAPAN

Sepanjang sejarah PMII dari Tahun 80an hingga 2010, ada 2 (dua) Paradigma yang telah dan sedang digunakan. Masing-masing menggantikan model paradigma sebelumnya. Pergantian paradigma ini mutlak diperlukan sesuai perubahan dengan konteks ruang dan waktu. Ini bersesuaian dengan kaidah *Taghoyyurul ahkami bi taghoyyuril azminati wal amkinati*. Bahwa hukum itu bisa berubah sesuai dengan perubahan waktu dan tempat. Berikut ada beberapa jenis paradigma yang disinggung pada pembahasan di atas:

1. **Paradigma Arus Balik Masyarakat Pinggiran**

Ketika **A. Muhaimin Iskandar** menjabat sebagai Ketua Umum PMII sempat di gelontarkan sebuah paradigma yang terkenal dengan sebutan "**Paradigma Arus Balik Masyarakat Pinggiran**" lahir paradigma ini tak terlepas dari pemimikiran mantan preseden RI kita yaitu **Gusdur** mengenai demokrasi dan civil society. Keberanian mengkritik orde baru yang di peragakan oleh aktifis PMII. implikasinya, semangat memperjuangkan demokrasi dan civil society menjadi gairah baru dalam gerakan PMII.

Paradigma arus balik masyarakat pinggiran harus terpatahkan tak kala **Gusdur** menjadi preseden RI. Sebagian kader PMII mempertanyakan lagi akankah perjuagan civil society harus berakhir disi?, Perpecahan di tubuh PMII terjadi kala itu, sebagaimana juga terjadi di tubuh NU, yakni PMII Struktural dan PMII Kultural. PMII Struktural adalah yang memilih untuk 'membela' Gus Dur. Sedang PMII Kultural tetap menempati posnya terdahulu.

Secara massif, paradigma gerakan PMII masih kental dengan nuansa perlawanan frontal baik terhadap negara maupun terhadap kekuatan di atas negara (kapitalis internasional). Sehingga ruang taktis-strategis dalam kerangka cita-cita gerakan yang berorientasi jangka panjang justru tidak memperleh tempat. Aktifis-aktifis PMII masih mudah terjebak-larut dalam persoalan temporal-spasial, sehingga gerak perkembangan internasional yang sangat berpengaruh terhadap arah perkembangan indonesia luput dibaca.

2. **Paradigma Kritis Transformatif**

Maka pada periode ketua umum PMII sahabat **Syaiful Bahri Anshari**, diperkenalkan Paradigma Kritis Transformatif**.** Hakikatnya Tak jauh beda dengan paradigma pergerakan, titik bedanya ada pada pedalaman teori paradimataik serta pengambilan exsemplar pada madzhab frankfrurt tokohnya adalah **Jurgen habermas (kubu adormo**) serta nilai kritisnya wacana intelektual muslim seperti Hassan Hanafi, Muhamad Arkoun, Asghar Ali Engineer dll. Paradigma kritis yang menjadi landasan tokoh tersebut adalah untuk membebaskan dirinya dari dogmatis agama yang distortif. Artinya bahwa bangunan pemikiran yang di kader PMII punya landasan teoritik sehingga mempunyai analisa yang mendalam.

Kata"**kristis"** menurut kamus ilmiah popoler adalah tajam, tegas dan teliti dalam menangapai atau memberikan penilayan secara mendalam. Sehingga teori kritis adalah teori yang berusahamelakukan analisa secara tajam dan teliti terhadap realitas. Sehingga teori kritis adalah teori yang berusaha melakukan analisa secara tajam dan teliti terhadap realitas.pada dasarnya teori kritis menjadi disputasi publik di kalangan filsafat sosial dan sosiologi

pada tahun 1961. Konfrontasi intelektual yang cukup terkenal adalah perdebatan epistemologi social

3. **Paradigma Menggiring Arus**

   Begitu juga dengan kepengurusan Sahabat mantan ketua umum **Hery Haryanto Azumi**yang dengan susah payah membangun paradigma bukan melawan arus dan bukan pula mengikuti arus, tetapi membangun "P**aradigma Menggiring Arus"** . yaitu paradigma yang mampu menjadikan sejarah sebagai bahan penyusun yang di padukan dengan kenyataan hari ini. Bahwa sejarah telah menyimpan masa lalu yang telah memyusun masa kini dan masa depan.

   Jadi, dengan mengkobinasikan dengan hari ini, kita akan mampu membaca keadaan atau kenyataan secara benar sehingga kita tidak terjebak mediatik dan manipulative yang menyesatkan. Dengan berangkat dari kenyatan real, kita aka mampu menangkap apa sat ini bergerak dan gerakan akan mampu memutus roda roda peradapan yang hegemonik. Dalam bukunya "Multi Level Strategi". Paradigma ini tidak di tulis karna paradigma ini sebagai arternatif saja.

Teori kritis berangkat dari 4 tokoh besar:

a) Immanuael Kahn **(**Kritik dalam Pengertian Kantian**)**

Melihat teori kritis dari suatu ilmu pengetahuan secara subyektif sehingga akan membentuk paradigma segala sesuatu sec`ra subyektif pula. Kant menumpukkan analisisnya pada aras epistemologis; tradisi filsafat yang bergulat pada persoalan 'isi" pengetahuan. Untuk menemukan kebenaran, Bisa juga disederhanakan bahwa kritik Kant terhadap epistemologi tentang (*kapasitas rasio dalam persoalan pengetahuam)* bahwa rasio dapat menjadi kritis terhadap kemampuannya sendiri dan dapat menjadi 'pengadilan tinggi'. Kritik ini bersifat transendental. Kritik dalam pengertian pemikiran Kantian adalah kritik sebagai kegiatan menguji kesahihan klaim pengetahuan tanpa prasangka.

b) Hegel **(**Kritik dalam pengertian Hegelian**)**

Hegel memandang teori kritis sebagai proses totalitas berfikir. Dengan kata lain, kebenaran muncul atau kritisisme bisa tumbuh apabila terjadi benturan dan pengingkaran atas sesuatu yang sudah ada. Kritik dalam pengertian Hegel didefinisikan sebagai refleksi diri atas tekanan dan kontradiksi yang menghambat proses pembentukan diri-rasio dalam sejarah manusia dan hegel merupakan peletak dasar metode berfikir yang dialektis.

c) Karl Marx **(**Kritik dalam Pengertian Marxian**)**

Menurut Marx, konsep Hegel seperti orang berjalan dengan kepala. Ini adalah terbalik. Dialektika Hegelian dipandang terlalu idealis, yang memandang bahwa, yang berdialektika adalah pikiran. Ini kesalahan serius sebab yang berdialektika adalah kekuatan-kekuatan material dalam masyarakat. Pikiran hanya refleksi dari kekuatan material (modal produksi masyarakat). Sehingga teori kritis bagi Marx sebagai usaha mengemansipasi diri dari penindasan dan elienasi yang dihasilkan oleh penguasa di dalam masyarakat. Kritik dalam pengertian Marxian berarti usaha untuk mengemansipasi diri dari alienasi atau keterasingan yang dihasilkan oeh hubungan kekuasaan dalam masyarakat.

d) Sigmund Freud (Kritik dalam Pengertian Freudian**)**

Madzhab frankfrut menerima Sigmun Freud karena analisis Freudian mampu memberikan basis psikologis masyarakat dan mampu membongkar konstruk kesadaran dan pemberdayaan masyarakat. Freud memandang teori kritis dengan refleksi dan analisis psikoanalisanya. Artinya, bahwa orang bisa melakukan sesuatu karena didorong oleh keinginan untuk hidupnya sehingga manusia melakukan perubahan dalam dirinya. Kritik dalam pengertian Freudian adalah refleksi atas konflik psikis yang menghasilkan represi dan memanipulasi kesadaran.

Adopsi Teori Kritis atas pemikiran Freudian yang sangat psikologistik dianggap sebagai pengkhianatan terhadap ortodoksi marxisme klasik.Berdasarkan empat pengertian kritis di atas, teori kritis adalah teori yang bukan hanya sekedar kontemplasi pasif prinsip-prinsip obyektif realitas, melainkan bersifat emansipatoris.

Sedangkan teori yang emansipatoris harus memenuhi tiga syarat :

1. Bersifat kritis dan curiga terhadap segala sesuatu yang terjadi pada zamannya.
2. Berfikir secara historis, artinya selalu melihat proses perkembangan masyarakat.
3. Tidak memisahkan teori dan praksis. Tidak melepaskan fakta dari nilai semata-mata untuk mendapatkan hasil yang obyektif.

Dalam perspektif "**Tranformatif**" dianut epistimologi perubahan non-esensialis. Perubahan yang tidak hanya menumpukan pada revolusi politik atau perubahan yang bertumpu pada agen tunggal sejarah; entah kaum miskin kota (KMK), buruh atau petani, tapi perubahan yang serentak yang dilakukan secara bersama-sama. Disisi lain makna tranformatif harus mampu mentranformasikan gagasan dan gerakan sampai pada wilayah tindakan praksis ke masyarakat.

Model-model transformasi yang bisa dimanifestasikan pada dataran praksis antara lain.

Maka gerakan ini di lapangan polanya sama dengan periode sebelumnya. Gerakan PMII terkonsentrasi pada aktivitas jalanan dan wacana kritis. Semangat perlawanan oposisi (perang terbuka), baik dengan negara maupun dengan kapitalisme global terus hangat mewarnai semangat PMII.

Pada masa **Sahabat Malik Haramain**, menjabat sebagai ketua umum PMII "**Membangun Sentrum Gerakan Di Era Neo Liberal**",paradigama di atas adalah melanjutkan kegagapan PMII dalam bersinggungan dengan kekuasaan. Paradigama ini oleh banyak kader di anggap sesisten terhadap pembacaan otoritarisme tanpa melihat kompleksitas aktor di level nasional yang selalu terkait dengan perubahan ditingkat global dan siklus politik ekonomi yang terjadi. Dengan kata lain, paradigma yang dibangun ini di anggap hanya sebagai bunyi-bunyian yang tidak pernah secara riil menjadi habitus atau laku di PMII.

STRATEGI DAN TAKTIK PENGEMBNGAN ORGANISASI

Ahmad Atho' Lukman Hakim, S.Ag, M.Sc

A. Beberapa Aspek Organisasi

Visi
Uraian tentang *keadaan* yang dicita-citakan di mana *nilai-nilai* kesantrian yang dianut dapat terwujud setelah *melewati beberapa program kerja*

Misi
Uraian tentang *bidang-bidang utama* pilihan lembaga untuk mencapai keadaan sebagaimana terumuskan dalam visi

Struktur Organisasi
Pelapisan fungsi dan *tanggung jawab utama* dalam institusi yang dibuat *berjenjang* untuk menjamin *efektifitas* dan *efisiensi* institusi dalam mencapai cita-cita

Prinsip Kerja
Kesepakatan tentang *aturan utama* dalam *mengatur perilaku* dan *mekanisme organisasi* sebagai cerminan nilai-nilai yang dianut santri

Produk Unggulan
Hasil kerja yang *paling dapat diandalkan* lembaga di antara hasil lain, karena *mutu, citra, dan keberlanjutannya*.

B. Perencenaan Strategis

1. Strategic planning terdiri dari tiga hal utama:
   - ✓ Institutional building
   - ✓ Institutional development
   - ✓ Capacity building
2. Alur Perencanaan Strategis
   - ✓ *Pertama*: Analisis lingkungan eksternal
     - Analisis ekosobudpol
     - Analisis trend
   - ✓ *Kedua,* Analisis stakeholder
   - ✓ *Ketiga*, Analisis pelanggan
   - ✓ *Keempat,* Analisis internal (swot)
     - Visi
     - Misi
     - Leadership
     - SDM

- Organisasi
- Manajemen
- Keuangan
- Jaringan
- Image

3. Visi
4. Misi
5. Struktur Organisasi
6. Prinsip kerja
7. Produk Unggulan
8. Program kerja
   - ✓ Pendek
   - ✓ Menengah
   - ✓ Panjang
9. Program tahunan
10. Implemantasi
11. Pengawalan
12. Evaluasi

C. Tahapan Organisasi

Pemula	Mulai tertata rapi	Telah mantap	Mampu berdikari
Baru berdiri	Penataan	Pemekaran	Pemapanan
Pembentukan	Saling mendukung	Kegiatan berjalan	Kegiatan berkelanjutan
Awal kesepakatan	Bertunas	Berbuah	Berkembang biak
Kuncup			
Masih berkutat soal nama organisasi. Ini tidak begitu penting Organisasi ini baru berdiri. Yang dimaksud sebagai pemula	Tahp di mana warna organisasi sudah kian jelas warnanya. Dengan selektif memilih masalah organisasi menjadi memiliki ide atau gagasan yang lumayan	Organisasi sudah semakin teratur. Kesepatakan antar pengurus telah terbentuk, begitu juga mekanisme kerja yang kompak antar	Mandiri bukan hanya dalam konteks keuangan, namun dalam pengertian organisasi telah memiliki tingkat dan proses serta tujuan yang jelas, sehingga dapat

adalah suatu tahapan di mana organisasi belum mampu membuktikan bahwa dirinya telah mengfungsikan komponen-komponennya sedemikian hingga secara efektif dan aktif membantu organisasi mencapai cita-citanya. Pada tahap ini organisasi berkecenderungan mencari bentuk, berkeinginan menggarap semua bidang, atau gagasan besar. Telah terbentuk pegangan operasional meskipun sederhana.	jelas mengenai hal-hal yang akan dilakukan, dan bagaimana melakukannya. Namuan banyak hal yang masih amburadul dan banyak hal yang mesti dibenahi. Organisasi memgambil langkah-langkah informal, guna memperlancar operasional dan program program terkait.	mereka, bukan hanya dalam hal mandat organisasi, namun juga bagaimana mendorong kinerja organisasi. Sudah mulai terbentuk manual operasional. Semacam standar operating procedures.	berkonsentrasi penuh dan mantap dalam permasalahan mendasar organisasi. Dengan kata lain, berbagai aspek pendukung yang selama membebani telah dapat dituntaskan, dan bergerak menuju eksplorasi kegiatan baru yang lebih luas dan bermanfaat.

ASWAJA SEBAGAI MANHAJ

Oleh : Ahmad Khufaji Jaufan

PEMAHAMAN DASAR

Semenjak sabda Nabi yang mengatakan bahwa agama Islam akan terpecah menjadi 73 golongan, dan hanya satu yang benar diantara kesemua golongan tersebut, berbagai aliran dalam agama islam dari zaman dulu sampai sekarang akhirnya mengklaim bahwa diri mereka masing-masing merupakan satu-satunya golongan yang benar dan sesuai dengan ajaran Nabi yang dikenal dengan ASWAJA.

Secara umum yang paling banyak dikenal orang pemaknaan akan Ahlussunnah wal jama'ah (Aswaja) adalah madzhab keislaman yang menjadi dasar jam'iyyah Nahdlatul Ulama' (NU) sebagaimana dirumuskan oleh Hadlratus **Syaikh K.H. M. Hasyim Asy'ari** dalam *Qanun Asasi* . Yaitu : Dalam ilmu aqidah/teologi mengikuti salah satu dari **Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi**. Dalam syari'ah/fiqh mengikuti salah satu Imam empat: **Abu Hanifah, Malik bin Anas, Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal**. Dalam tashawuf/akhlaq mengikuti salah satu dua Imam: **Junaid al-Baghdadi dan Abu Hamid al-Ghazali.** Terbuka juga jika terdapat pemaknaan lain dari ASWAJA selain dari yang diatas, (barangkali ada yang berbeda). Akan tetapi apapun pemaknaan terhadap ASWAJA selama ini, lebih-lebih seperti diatas, semua itu kurang memadai untuk dijadikan tempat berpijak dalam sebuah pergerakan. Sebab, pemahaman yang demikian lebih mengarah pada pemahaman yang kaku dan kurang bisa menyesuaikan terhadap kondisi sosial yang berkembang. Dimana pemahamannya tersendat pada sebuah pemikiran tokoh (sekalipun terpandang dan terhormat), lingkungan, tempat, faktor politik, dan berbagai kondisi sosial saat itu yang jauh berbeda dengan masa sekarang bahkan dimasa yang akan datang. Padahal sebuah pergerakan membutuhkan pijakan yang syarat akan pemaknaan Aswaja yang fleksibel, tidak kaku, dan selalu ada ruang untuk ditafsiri ulang untuk disesuaikan lagi dengan kondisi sosial yang sedang berkembang.

Oleh karena itu, PMII memaknai Aswaja sebagai;

1. Manhajul fikr yaitu sebagai sebuah metode berpikir yang digariskan oleh para sahabat Nabi dan tabi'in yang begitu erat kaitannya dengan situasi politik dan kondisi sosial yang meliputi masyarakat muslim waktu itu. Baik cara mereka menyikapi berbagai kemelut perbedaan antar keyakinan atau dalam memahami keruhnya konstelasi politik, yang kesemua itu berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan yang terselubung dalam makna ASWAJA. Dari *manhajul fikr* ini

kemudian lahir pemikiran-pemikiran keislaman baik di bidang aqidah, syari'ah, maupun akhlaq/tasawuf, yang *binneka tunggal ika* dalam ruh yang sama.

*2. Manhaj taghayyur al-**ijtima'i*** yaitu sebuah pola perubahan sosial-kemasyarakatan yang sesuai dengan ruh perjuangan rasulullah dan para sahabatnya. Untuk memahami pola perubahan ini dibutuhkan pemahaman akan perjalanan sejarah kebudayaan islam yang nantinya terurai dalam materi pendalaman tentang ASWAJA

Dari pemahaman diatas, pada pokoknya pemahaman Aswaja baik sebagai metode berpikir (*manhajul fikr)* maupun pola perubahan sosial (*manhaj taghayyur al-ijtima'i*) adalah sesuai dengan sabda Rasulullah yang mengatakan bahwa: *ma ana 'alaihi wa ashabi* (segala sesuatu yang datang dari rasul dan para sahabatnya) yaitu metode berpikir dan pola perubahan sosial yang diusung, yang sebenarnya berlandaskan pada beberapa nilai berikut : moderat (*tawassuth),* toleran (*tasamuh),* keseimbangan (*tawazun*)*,* dan keadilan *(ta'adul)*

NILAI-NILAI ASWAJA

1. Nilai-nilai Kemoderatan (Tawassuth)

Khairul umur awsathuha (moderat adalah sebaik-baik perbuatan). Tawassuth bisa dimaknai sebagai berdiri di tengah, moderat, tidak ekstrim, tetapi memiliki sikap dan pendirian yang teguh dalam menghadapi posisi dilematis antara yang liberal dan konserfatif, kanan dan kiri, Jabariyah dan Qadariah, dengan mempertimbangkan kemaslahatan umat dalam garis-garis tuntunan Al-quran dan As-sunnah . Maka kurang benar jika PMII dikenal terlalu liberal dalam pemikiran, karena bertentangan dengan nilai-nilai tawassuth yang menjadi jantung pijakan dari PMII itu sendiri. Tetapi PMII lebih dialektis, lebih terbuka dalam pola berpikir, tidak terjebak dalam pemahaman fanatik yang berbuah pada sebuah kebenaran yang arbitrer (benar menurut diri sendiri).

Bersikap tawassuth dalam bidang aqidah adalah di satu sisi tidak terjebak dalam rasionalitas buta dan terlalu liberal (sehingga menomorduakan al-quran dan sunnah rasul), di sisi lain tetap menempatkan akal untuk berfikir dan menafsirkan al-quran dan al-sunnah yang sesuai dengan kondisi.

Fiqih atau hukum Islam yang tawassuth adalah seperangkat konsep hukum yang di dasarkan kepada Al-quran dan hadits, namun pemahamannya tidak sekadar bersandar kepada tradisi,juga tidak kepada rasionalitas akal belaka.

Tasawuf yang tawassuth adalah spiritualitas ketuhanan yang menolak konsep pencapaian haqiqah (hakikat Tuhan) dengan meninggalkan syari'ah ataupun sebaliknya. Tasawuf yang tawassuth menjadikan taqwa (syari'ah) sebagai jalan utama menuju haqiqah.

2. Nilai-nilai Toleransi (Tasamuh)

Tasamuh adalah toleran, Sebuah **pola sikap** yang menghargai perbedaan, tidak memaksakan kehendak dan merasa benar sendiri. Nilai yang mengatur bagaimana kita harus bersikap dalam hidup sehari-hari, khususnya dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat. Biarkan semuanya partikular, tidak harus seragam dengan kita. Arah dari nilai toleransi ini adalah kesadaran akan pluralisme atau keragaman, baik itu dalam beragama, budaya, keyakinan, dan setiap dimensi kehidupan yang harusnya saling berkomplementer (saling melengkapi). Sebagaimana konsep *binneka tunggal ika* (berbeda-beda tapi tetap satu) dan ayat Al-Quran yang berbunyi "*lakum dinukum wal-yadin*" (bagimu agamamu, bagiku agamaku) yang dengan perbedaan ini kita mendapat rahmat, hidup kita lebih variatif.

Dalam arus filsafat yang saat ini berkembang, saatnya menyapu (sweeping) dan meruntuhkan metafisika kehadiran (konsep tunggal yang kebenarannya adalah satu). Sebuah konsep yang memaksakan kebenarannya terhadap yang lain, tanpa menerima perbedaan dan menolak akan kebenaran yang lain.

3. Nilai-nilai Keseimbangan (Tawazun)

Tawazun berarti keseimbangan dalam **pola hubungan** atau **relasi,** baik yang bersifat antar individu, antar struktur sosial, antara Negara dan rakyatnya, maupun antara manusia dan alam. Keseimbangan di sini adalah bentuk hubungan yang tidak berat sebelah (menguntungkan pihak tertentu dan merugikan pihak yang lain). Tetapi, masing-masing pihak mampu menempatkan dirinya sesuai dengan fungsinya tanpa mengganggu fungsi dari pihak yang lain. Hasil yang diharapkan adalah terciptanya kedinamisan hidup.

Dalam ranah sosial yang ditekankan adalah egalitarianisme (persamaan derajat) seluruh umat manusia. Tidak ada yang merasa lebih dari yang lain, yang membedakan hanyalah tingkat ketakwaannya. Tidak ada dominasi dan eksploitasi seseorang kepada orang lain, termasuk laki-laki terhadap perempuan.

Dalam wilayah politik, tawazun meniscayakan keseimbangan antara posisi Negara (penguasa) dan rakyat. Penguasa tidak boleh bertindak sewenang-wenang, menutup kran demokrasi, dan menindas rakyatnya. Sedangkan rakyat harus selalu mematuhi segala peraturan yang ditujukan untuk kepentingan bersama, tetapi juga senantiasa mengontrol dan mengawasi jalannya pemerintahan.

Dalam wilayah ekonomi, tawazun meniscayakan pembangunan sistem ekonomi yang seimbang antara posisi Negara, pasar dan masyarakat. Fungsi Negara adalah sebagai pengatur sirkulasi keuangan, perputaran modal, pembuat rambu-rambu atau aturan main bersama dan mengontrol pelaksanaannya. Tugas

pasar adalah tempat pendistribusian produk yang memposisikan konsumen dan produsen secara seimbang, tanpa ada satu pihak pun yang ditindas. Fungsi masyarakat (khususnya konsumen) di satu sisi adalah menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif, yang di dalamnya tidak ada monopoli; dan di sisi lain mengontrol kerja negara dan pasar.

4. Nilai-nilai Keadilan (Ta'adul)

Yang dimaksud dengan ta'adul adalah keadilan, yang merupakan *pola integral* dari tawassuth, tasamuh, dan tawazun. Dengan adanya keseimbangan, toleran, dan moderat maka akan mengarah pada sebuah nilai keadilan yang merupakan ajaran universal Aswaja. Setiap pemikiran, sikap dan relasi, harus selalu diselaraskan dengan nilai ini. Pemaknaan keadilan yang dimaksud di sini adalah keadilan sosial. Yaitu nilai kebenaran yang mengatur totalitas kehidupan politik, ekonomi, budaya, pendidikan, dan sebagainya. Sejarah membuktikan bagaimana Nabi Muhammad mampu mewujudkannya dalam masyarakat Madinah. Bagitu juga Umar bin Khattab yang telah meletakkan fundamen bagi peradaban Islam yang agung.Sebenarnya keempat nilai inilah yang menjadi metode berpikir dan pola perubahan sosial dari Nabi dan para sahabatnya.

SKETSA SEJARAH

Ahlussunnah wal Jama'ah (ASWAJA) lahir dari pergulatan intens antara doktrin dengan sejarah. Di wilayah doktrin, debat meliputi soal kalam mengenai status Alqur'an apakah ia mahluk atau bukan, kemudian debat antara sifat-sifat Allah antara ulama' salafiyyun dengan golongan Mu'tazilah dan seterusnya.

Di wilayah sejarah, proses pembentukan ASWAJA terentang hingga zaman Khulafaur Rasyidin, yakni dimulai sejak terjadi perang shiffin yang melibatkan Kholifah Ali bin Abi Tholib RA dengan Muawiyyah. Bersamaan dengan kekalahan kholifah ke-empat tersebut, setelah dikelabui melalui taktik arbitrase (tahkim) oleh kubu muawiyyah, ummat islam mulailah islam terpecah ke dalam berbagai golongan. Di antara mereka terdapat Syi'ah, Khowarij, Jabariyyah, Qadariyyah, Mu'tazilah,dll.

Indonesia merupakan salah satu penduduk dengan jumlah penganut faham ASWAJA terbesar di dunia. Mayoritas penduduk yang memeluk islam adalah penganut madzhab Syafi'i dan sebagian besarnya tergabung (baik tergabung secara sadar maupun tidak sadar) dalam Jam'iyyah Nahdlotul Ulama' yang sejak awal berdiri menegaskan sebagi pengamal islam ala Ahlusunnah wal Jama'ah.

Al-sunnah memilki arti jalan,disamping memiliki arti Al-Hadist. Disambungkan dengan ahl keduanya bermakna pengikut jalan Nabi, Para Sahabat, dan Tabi'in. Al-Jama'ah berarti sekumpulan orang yang memiliki

tujuan. Bila dimaknai secara kebahasaan, Ahlussunnah wal Jama'ah berarti segolongan orang yang mengikuti jalan Nabi, Para Sahabat dan Tabi'in.

NU merupakan ORMAS islam pertama kali Indonesia yang menegaskan diri berfaham ASWAJA. Dalam konstitusi dasar yang dirumuskan oleh KH. Hasyim Asy'ari juga tidak disebutkan definisi ASWAJA namun tertulis dalam konstitusi tersebut bahwa aswaja merupakan sebuah faham keagamaan dimana dalam bidang aqidah menganut pendapat dari Abu Hasan Al-Asy'ari dan Al-Maturidhi, dalam bidang fiqih menganut pada salah satu madzhab empat, dan dalam bidang tasawuf menganut pada Imam Junaid al Baghdadi dan Abu Hamid Al-Ghozali.

Berikut ini adalah prinsip-prinsip aswaja dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip-prinsip tersebut meliputi

1. Aqidah
2. Bidang Sosial Politik
   a. Prinsip Syura (musyawarah)
   b. Prinsip Al-Adl (keadilan)
   c. Prinsip Al-Hurriyyah (kebebasan)
      - Khifdhu al-nafs (menjaga jiwa)
      - Khifdhu al-din (menjag agama)
      - Khifdhu al-mal (menjaga harta benda)
      - Khifdhu al-nasl (menjaga keturunan)
      - Khifdhu al-irdh (menjaga harga diri)
   d. Prinsip Al-Musawah (kesetaraan derajat
3. Bidang Istinbath Al-Hukm (Pengambilan Hukum Syari'ah)
4. Taswwuf

Ahlussunnah wal Jama'ah sebagai manhaj al fikr bersifat dinamis dan sangat terbuka bagi pembaruan-pembaruan. Sebagai sebuah metode pemahaman dan penghayatan dalam makna tertentu ia tidak dapat disamakan dengan metode akademis yang bersifat ilmiah. Dalam metode akademik, sisi teknikalitas pendekatan di atur sedemikian rupa sehingga menjadi prosedur yang teliti dan nyaris pasti. Namun demkian dalam ruang akademis pembaharuan atau perubahan sangat mungkin terjadi.

ANALISIS SOSIAL (ANSOS)

Oleh : Syamsyul Arifin Zrt

A. PENGERTIAN ANSOS

Analisis sosial merupakan usaha untuk menganalisis sesuatu keadaan atau masalah sosial secara objektif. Analisis sosial diarahkan untuk memperoleh gambaran lengkap mengenai situasi sosial dengan menelaah kaitan-kaitan histories, struktural dan konsekuensi masalah. Analisis sosial akan mempelajari struktur sosial, mendalami fenomena-fenomena sosial, kaitan-kaitan aspek politik, ekonomi, budaya, dan agama. Sehingga akan diketahui sejauh mana terjadi perubahan sosial, bagaimana institusi sosial yang menyebabkan masalah-masalah sosial, dan juga dampak sosial yang muncul akibat masalah sosial

Analisis sosial atau yang lebih akrab dikenal ansos ini merupakan sebuah proses atau mekanisme yang akan membahas problematika-probelmatika yang terjadi pada sebuah objek analisa dan pada akhirnya akan menghasilkan apa sebenarnya yang menjadi akar permasalahan atas problematika-problematika tersebut. Dari sana, kita dapat menentukan apa sebenarnya yang dibutuhkan untuk dicarikan solusi yang tepat.

Inilah yang acapkali tidak dilalui oleh para problem solver. Mereka seringkali menghasilkan solusi atas problematika yang hadir bukan berdasarkan hasil analisis mendalam namun hanya berdasarkan dugaan yang argumentasinya lemah atau bahkan hanya berdasarkan pada kemauannya saja. Mungkin permasalahan yang nyata di lapangan akan terselesaikan, namun karena ia tak akan menyentuh sampai ke akarnya maka akan hadir permasalahan-permasalahan baru atau bahkan permasalahan yang nyata tersebut tidak hilang sama sekali.

B. RUANG LINGKUP ANSOS

Pada dasarnya semua realitas sosial dapat dianalisis, namun dalam konteks transformasi sosial, maka paling tidak objek analisa sosial harus relevan dengan target perubahan sosial yang direncanakan yang sesuai dengan perubahan. Secara umum objek sosial yang dapat dianalisis antara lain;

- Masalah-masalah sosial, seperti : kemiskinan, pelacuran, pengangguran, kriminilitas.
- Sistem sosial, seperti : tradisi, usaha kecil atau menengah, sistem pemerintahan, sistem pertanian.
- Lembaga-lembaga sosial seperti sekolah layanan rumah sakit, lembaga pedesaan. Kebijakan publik seperti : dampak kebijakan BBM, dampak perlakuan sebuah UU.

C. PENTINGNYA TEORI SOSIAL

Teori dan fakta berjalan secara simultan, teori sosial merupakan refleksi dari fakta sosial, sementara fakta sosial akan mudah dianalisis melalui teori-teori sosial. Teori sosial melibatkan isu-isu mencakup filsafat, untuk memberikan konsepsi-konsepsi hakekat aktifitas sosial dan prilaku manusia yang ditempatkan dalam realitas empiris. Charles lemert (1993) dalam Sosial Theory ; The Multicultural And Classic Readings menyatakan bahwa teori sosial memang merupakan basis dan pijakan teknis untuk bisa survive.

Teori sosial merupakan refleksi dari sebuah pandangan dunia tertentu yang berakar pada positivisme. Menurut Anthony Giddens secara filosofis terdapat dua macam analisis sosial. Pertama, analisis intitusional, yaitu ansos yang menekan pada keterampilan dan kesetaraan aktor yang memperlakukan institusi sebagai sumber daya dan aturan yang diproduksi terus-menerus. Kedua, analisis perilaku strategis, adalah ansos yang memberikan penekanan institusi sebagai sesuatu yang diproduksi secara sosial.

D. LANGKAH-LANGKAH ANSOS

Proses analisis sosial meliputi beberapa tahap antara lain :

1. Memilih dan menentukan objek analisis :
   Pemilihan sasaran masalah harus berdasarkan pada pertimbangan rasional dalam arti realitas yang dianalisis merupakan masalah yang memiliki signifikansi sosial dan sesuai dengan visi atau misi organisasi.
2. Pengumpulan data atau informasi penunjang :
   Untuk dapat menganalisis masalah secara utuh, maka perlu didukung dengan data dan informasi penunjang yang lengkap dan relevan, baik melalui dokumen media massa, kegiatan observasi maupun investigasi langsung di lapangan. Recek data atau informasi mutlak dilakukan untuk menguji validitas data.
3. Identifikasi dan analisis masalah :
   Merupakan tahap menganalisis objek berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Pemetaan beberapa variable, seperti keterkaitan aspek politik, ekonomi, budaya, dan agama dilakukan pada tahap ini. Melalui analisis secara komphrehensif diharapkan dapat memahami subtansi masalah dan menemukan saling keterkaitan antara aspek.
4. Mengembangkan presepsi :
   Setelah diidentifikasi berbagai aspek yang mempengaruhi atau terlibat dalam masalah, selanjutnya dikembangkan presepsi atas masalah sesuai cara pandang yang objektif. Pada tahap ini akan muncul beberapa kemungkinan implikasi konsekuensi dari objek masalah, serta pengembangan beberapa alternatif sebagai kerangka tindak lanjut.

5. Menarik kesimpulan :
   Pada tahap ini telah diperoleh kesimpulan tentang ; akar masalah, pihak mana saja yang terlibat, pihak yang diuntungkan dan dirugikan, akibat yang dimunculkan secara politik, sosial dan ekonomi serta paradigma tindakan yang bisa dilakukan untuk proses perubahan sosial.

E. PERANAN ANSOS DALAM STRATEGI GERAKAN PMII

Ingat, paradigma gerakan PMII adalah kritis transformatif, artinya PMII dituntut peka dan mampu membaca realitas sosial secara objektif (kritis), sekaligus terlibat aktif dalam aksi perubahan sosial (transformatif). Transformasi sosial yang dilakukan PMII akan berjalan secara efektif jika kader PMII memiliki kesadaran kritis dalam melihat realitas sosial. Kesadaran kritis akan muncul apabila dilandasi dengan cara pandangan luas terhadap realitas sosial. Untuk dapat melakukan pembacaan sosial secara kritis, mutlak diperlakukan kemampuan analisis sosial secara baik. Artinya, strategi gerakan PMII dengan paradigma kritis transformatif akan dapat terlaksana secara efektif apabila ditopang dengan kematangan dalam analisis sosial (ANSOS).

Perjumpaan Awal dengan Ansos

Tulisan ini saya maksudkan sebagai sebuah pengantar perkenalan dengan AnSos, Meski sudah tidak asing lagi dengannya, semoga akan tetap bermanfaat bagi kita sehingga bisa semakin melengkapi aplikasi-praktik AnSos kita.

AnSos secara umum adalah sebuah upaya seseorang atau kelompok untuk mendapatkan gambaran lebih jelas tentang kondisi atau situasi sosial dengan menggali aspek kesejarahan dan nilai-nilai tertentu dalam kaitannya dengan fenomena sosial. Atau, menurut sebagian sosiolog didefinisikan sebagai ‘usaha’ untuk lebih memahami situasi sosial dengan menggali hubungan-hubungan historis dengan struktural di dalamnya.

Tujuan AnSos paling-tidak adalah untuk membongkar (discover) problematika atau ketimpangan sosial di sekitar kita, hingga—diusahakan—sampai ke akar-akar masalah beserta macam-macam motif-nya. Objek AnSos adalah fakta, struktur, pelaku, dan sistem sosial; meski banyak perbedaan teoritis-metodologis di kalangan teoritisi atau praktisi sosiologi (juga cultural studies), yang berakibat pula pada (fokus) objek yang dikaji. Diversitas teori, metode dan teknik dalam praktik AnSos diantaranya disebabkan oleh perbedaan paradigm.

Paradigma dan diversitas teori (metode) dalam AnSos tidak jauh beda dengan yang ada pada Analisis Wacana atau analisis teks (sosial-humaniora) lainnya. Misalnya, secara umum (general) ada paradigma positivisme

(strukturalisme), interpretivisme (fenomenologis), dan kritis (misal: madzah Franfrut dan tokoh-tokoh posmodernisme).

Paradigma dan metode dalam AnSos dipengaruhi—terutama—oleh perjalanan dan perkembangan ilmu sosiologi dan cultural studies. Menurut Ritzer ada tiga paradigma dominan dalam ilmu sosiologi: paradigma fakta sosial, definisi sosial, dan perilaku social.

Paradigma Fakta Sosial

1. Eksemplar. Model yang digunakan teoritisi fakta sosial adalah karya Emile Durkheim, terutama The Rules of Sociological Method dan Suicide.
2. Gambaran tentang masalah pokok. Teoritisi fakta sosial memusatkan perhatian pada apa yang disebut Durkheim fakta sosial atau struktur dan institusi sosial berskala luas. Mereka yang menganut paradigma ini tak hanya memusatkan perhatian pada fenomena fakta sosial ini tetapi juga pada pengaruhnya terhadap pikiran dan tindakan individu.
3. Metode. Penganut paradigma ini lebih besar kemungkinannya menggunakan metode interview-kuesioner dan metode perbandingan sejarah ketimbang penganut paradigma lain.
4. Teori. Paradigma ini mencakup sejumlah perspektif teoritis. Teoritisi struktural fungsional cenderung melihat fakta sosial sama kerapian antar hubungan dan keteraturannya dengan yang dipertahankan oleh konsensus umum. Teoritisi konflik cenderung menekankan kekacauan antara fakta sosial dan gagasan mengenai keteraturan dipertahankan melalui kekuatan yang memaksa dalam masyarakat. Walaupun struktural-fungsionalisme dan teori konflik adalah teori-teori yang deominan dalam paradigma ini, namun masih ada teori lain, termasuk teori sistem.

Paradigma Definisi Sosial

1. Eksemplar. Model yang mempersatukan penganut paradigma ini adalah karya Max Weber tentang tindakan sosial.
2. Gambaran tentang masalah pokok. Karya Weber membantu menimbulkan minat di kalangan penganut paradigma ini dalam mempelajari cara aktor mendefinisikan siutasi sosial mereka dan dalam mempelajari pengaruh definisi situasi sosial ini terhadap tindakan dan integrasi berikutnya.
3. Metode. Walau penganut paradigma ini sangat besar kemungkinannya menggunakan metode interview-kuesioner, mereka lebih besar kemungkinannya menggunakan metode observasi ketimbang penganut paradigma lain. Dengan kata lain, observasi adalah metode khusus penganut paradigma definisi sosial.

4. Teori. Ada sejumlah besar teori yang dapat dimasukkan ke dalam paradigma ini: teori tindakan, interaksionisme simbolik, fenomenologi, etnometodologi, dan eksistensialisme.

Paradigma Perilaku Sosial

1. Eksemplar. Model bagi penganut paradigma ini adalah karya psikolog B.F. Skinner.
2. Gambaran tentang masalah pokok. Menurut penganut paradigma ini, masalah pokok sosiologi adalah perilaku individu yang tak dipikirkan. Perhatian utama penganut paradigma ini tertuju pada hadiah (rewards), yang menimbulkan perilaku yang diinginkan dan hukuman (punishments) yang mencegah perilaku yang tak diinginkan.
3. Metode. Metode khusus paradigma ini adalah eksperimen.
4. Teori. Ada pendekatan teoritis dalam sosiologi yang dapat dimasukkan ke dalam judul "Behaviorisme Sosial". Pertama adalah sosiologi behavioral yang berkaitan erat dengan psikologi behaviorisme. Kedua, yan jauh lebih penting, adalah teori pertukaran.

Dari macam paradigma ini, kita bisa membuat teknik-praktis sendiri dalam mekukan AnSos, atau bisa mengaplikasikan metode yang umum, misalnya metode-praktis SWOT, 'pohon masalah', mapping stake-holder (AnSos: Analisis Sosok), atau yang lainnya.

Adapun langkah-langkah AnSos secara garis besar sama dengan analisis lainnya:

- Menentukan objek (teks sosial) yang hendak dianalisa sekaligus membangun perumusan (fokus) masalah (problematika social.
- Membangun konsep minimal asumsi teoritis yang tepat (appropriate) atas konteks, serta pertanyaan-pertanyaan dan definisi (defining) kunci tentang struktur dan kultur terkait.
- Mengumpulkan data (terutama primer) dan pendukung (supporting-additional) terkait fenomena sosial (fakta, struktur-fungis, atau perilaku-hubungan), khususnya yang terkait erat dengan fokus masalah.
- Mengidentifikasi, mengklasifikasi dan menganalis masalah.
- Menguji sekilas atau mempersepsikan temuan 'awal', dalam rangka menjaga keabsahan (authenticity).
- Menarik kesimpulan hingga muncul hasil 'final'.

Aksi Advokasi sebagai Konskuensi

Akibat dari hasil AnSos adalah aksi gerakan dalam rangka memecahkan masalah sosial (makro/mikro). Dari data-data yang telah terhimpun dan temuan-temuan analisa—misalnya terakait kendala, motif, atau akar masalah beserta kekuatan dan kelemahan—kita akan lebih mudah dan 'bernas' dalam proses aksi advokasi.

Langkah-langkah advokasi akan lebih mudah (sistematis), sehingga membuahkan hasil yang lebih maksimal. Secara ideal, temuan AnSos mengarahkan kita pada gerakan perubahan, perjuangan (kelas, ketimpangan atau ketertindasan) sosial yang berkeadilan—meski sulit (atau bahkan ada yang meyakini tidak bisa) diwujudkan.

Akhirnya, menjadi 'subjek' (fa'il) dalam AnSos (membaca) akan semakin sempurna—pemanfaatannya—dengan menjadi 'subjek' dalam aksi advokasi atau gerakan perubahan lainnya, sehingga pada gilirannya kita akan menjadi benar-benar mandiri dalam keilmuan dan praktik kehidupan dan peradaban. Semoga.

F. LANGKAH-LANGKAH ANSOS

Proses analisis sosial meliputi beberapa tahap antara lain:

1. *Memilih dan menentukan objek analisis*
   Pemilihan sasaran masalah harus berdasarkan pada pertimbangan rasional dalam arti realitas yang dianalsis merupakan masalah yang memiliki signifikansi sosial dan sesuai dengan visi atau misi organisasi.
2. *Pengumpulan data atau informasi penunjang*
   Untuk dapat menganalisis masalah secara utuh, maka perlu didukung dengan data dan informasi penunjang yang lengkap dan relevan, baik melalui dokumen media massa, kegiatan observasi maupun investigasi langsung dilapangan. *Re-cek* data atau informasi mutlak dilakukan untuk menguji validitas data.
3. *Identifikasi dan analisis masalah*
   Merupakan tahap menganalisis objek berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Pemetaan beberapa variable, seperti keterkaitan aspek politik, ekonomi, budaya dan agama dilakukan pada tahap ini. Melalui analisis secara komphrehensif diharapkan dapat memahami subtansi masalah dan menemukan saling keterkaitan antara aspek.
4. *Mengembangkan presepsi*
   Setelah di identifikasi berbagai aspek yang mempengaruhi atau terlibat dalam masalah, selanjutnya dikembangkan presepsi atas masalah sesuai cara pandang yang objektif. pada tahap ini akan muncul beberapa

kemungkinan implikasi konsekuensi dari objek masalah, serta pengembangan beberapa alternative sebagai kerangka tindak lanjut.

5. *Menarik kesimpulan*
   Pada tahap ini telah diperoleh kesimpulan tentang; akar masalah, pihak mana saja yang terlibat, pihak yang diuntungkan dan dirugikan, akibat yang dimunculkan secara politik, sosial dan ekonomi serta paradigma tindakan yang bisa dilakukan untuk proses perubahan sosial.

Peranan Ansos Dalam Strategi Gerakan PMII

Ingat, paradigma gerakan PMII adalah kritis transformatif, artinya PMII dituntut peka dan mampu membaca realitas sosial secara objektif (kritis), sekaligus terlibat aktif dalam aksi perubahan sosial (*transformatif*). Transformasi sosial yang dilakukan PMII akan berjalan secara efektif jika kader PMII memiliki kesadaran kritis dalam melihat realitas sosial. Kesadaran kritis akan muncul apabila dilandasi dengan cara pandangan luas terhadap realitas sosial. Untuk dapat melakukan pembacaan sosial secara kritis, mutlak diperlakukan kemampuan analisis sosial secara baik. Artinya, strategi gerakan PMII dengan paradigma kritis transformatif akan dapat terlaksana secara efektif apabila ditopang dengan kematangan dalam analisis sosial (ANSOS).

G. REKAYASA SOSIAL

Prolog: Sebuah Kasus Awal

Mulanya biasa saja. Sebuah masyarakat di daerah terpencil pinggiran hutan di Kalimantan adalah komunitas adat yang setia terhadap warisan tradisi leluhur. Pemahaman mereka atas hutan, pohon dan tanah masih bersifat sakral dan berdimensikan transendental. Tapi sejak upaya modernisasi dari negara melalui proyek pembangunan dengan program transmigrasi, pengembangan kawasan desa hutan, pariwisata, dan apapun namanya, daerah tersebut mulai terbuka bagi masuknya arus masyarakat dari luar komunitas adat, tak terkecuali masuknya Media Televisi melalui antena parabola.

Keterbukaan masyarakat adat tersebut mulai terlihat dengan persentuhan dengan masyarakat luar yang juga membawa serta bentuk-bentuk kebudayaan; dari cara berpikir hingga perilaku. Tidak itu saja, masuknya televisi telah mampu merubah berbagai sistem nilai dan sistem makna yang terdapat dalam masyarakat terbut. Sebelum ada modernisasi (dan televisi) masyarakat tersebut memiliki kearifan lokal untuk selalu bersosialisasi, berinteraksi sosial, dan sebagainya. Ketika televisi baru memasuki desa dan jumlahnya belum seberapa, alat tersebut justru menjadi sarana yang memperkuat kebersamaan, karena tetangga yang

belum mempunyai televisi boleh menumpang menonton. Namun ketika televisi semakin banyak dan hampir tiap keluarga memilikinya, maka kebersamaan itu segera berkahir, karena masing-masing keluarga melewatkan acara malam mereka di depan pesawatnya.

Tanpa disadari media telivisi telah merubah segalanya dalam struktur maupun kultur masyarakat tersebut. Peristiwa itu meminjam istilah Ignas Kleden[1] menunjukkan bahwa nilai-nilai (kebersamaan atau individualisme) dan tingkah laku (berkumpul atau bersendiri), secara langsung dipengaruhi oleh hadirnya sebuah benda materiil. Parahnya, pola kehidupan yang menghargai kebersamaan beralih menjadi individualis, sifat gotong royong tergantikan sifat pragmatisme dalam memaknai segala bentuk kebersamaan dan kerja. Taruhlah misalnya ketika memaknai tanah warisan. Jika dulu bermakna teologis, sekarang lebih dimaknai bersifat ekonomis belaka. Tidak jarang jika dulu masyarakat mati-matian membela tanah warisnya, sekarang tergantikan kepentingan ekonomis untuk dijual kepada pengusaha dari kota. Tak pelak lagi, hotel-hotel, villa-villa, cafe-cafe dan apapun namanya mulai bermunculan di masyarakat terpencil tersebut. Lambat laun, masyarakat tersebut sudah berubah citranya secara fundamental sebagai masyarakat adat dengan kearifan lokalnya menjadi masyarakat ’pinggiran’ berwajah metropolitan dengan segenap perubahan yang ada. Sayangnya, yang diuntungkan dalam kondisi masyarakat yang demikian ternyata tidak merata. Bahkan hampir sebagian besar masyarakat tetap menjadi ’penonton’ dalam perubahan struktur maupun kultur yang terjadi.

Dalam kondisi yang demikian, apa yang seharusnya dilakukan? Membiarkan berada dalam situasi ketidakmenentuan, sehingga masyarakat adat kian tersisihkan atau tergerus oleh kepentingan ekonomis-pragmatis atau ikut serta terlibat merancang sebuah strategi perubahan sosial agar perubahan masyarakat tersebut dapat direncanakan.

Perubahan Sosial: *awal dari rekayasas sosial*

Prolog ini merupakan catatan awal untuk memberikan suatu preskripsi bahwa perubahan sosial merupakan keniscayaan yang menimpa suatu masyarakat, seberapapun dia tersisolasi. Persoalannya bagaimana perubahan sosial tersebut dirancang dengan perencanaan, sehingga yang muncul dalam masyarakat yang berada dalam *order* (tatanannya); meskipun didalamnay berkelindan berbagai perubahan. Artinya; tiada masyarakat yang dapat steril dari perubahan sosial. Justru perubahan sosial memberikan suatu bukti terjadinya dinamika di dalam masyarakat tersebut. Tanpa perubahan sosial, masyarakat tersebut adalah masyarakat yang ’mati’, stagnan, tanpa dinamika.

Terdapat dua (2) bentuk perubahan sosial. *Pertama*, perubahan sosial yang tidak terencana (*unplanned social change*). Perubahan social yang terjadi terus

menerus yang terjadi secara perlahan yang tanpa direncanakan yang biasanya diakibatkan oleh teknologi dan globalisasi. Perubahan dalam contoh di atas adalah salah satu bentuk adanya perubahan yang tidak disadari dengan hadirnya kebudayaan materiil, yakni televise. *Kedua,* perubahan social yang terencana (*planned social change*); yakni sebuah perubahan social yang didesain serta ditetapkan strategi dan tujuannya. Nah, dalam kasus perubahan social di desa adapt tersebut di atas juga terjadi akibat sebuah desain matang (rekayasa social) dari Negara, misalnya melalui proyek modernisasi yang berbalut ideologi pembangunanisme (*developmentalisme*).

Lalu apa sesungguhnya perubahan social tersebut. Perubahan social adalah proses perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi suatu sistem sosial[3]. Sementara Suparlan[4]menegaskan bahwa perubahan sosial adalah perubahan dalam struktur sosial dan pola-pola hubungan sosial, yang antara lain mencakup; sistem status, hubungan-hubungan dalam keluarga, sistem-sistem politik dan kekuatan, serta persebaran penduduk. Selain itu terdapat tiga (3) unsur penting perubahan sosial, yakni (1) sumber yang menjadi tenaga pendorong perubahan, (2) proses perubahan, dan (3) akibat atau konsekuensi perubahan ini.

Menurut Jalaluddin Rahmat, ada beberapa penyebab terjadinya perubahan sosial. (1) bahwa masyarakat berubaha karena *ideas*; pandangan hidup, pandangan dunia dan nilai-nilai.

Max Weber adalah salah satu tokoh yang percaya bahwa *ideas* merupakan penyebab utama terjadinya perubahan sosial. Hal ini dia perlihatkan dalam menganalisis perubahan sosial dalam masyarakat Eropa dengan semangat etik protestanismenya sehingga memunculkan spirit kapitalisme. Diakui oleh Weber bahwa ideologi ternyata berpengaruh bagi perkembangan dalam masyarakat. (2) yang mempengaruhi terjadinya perubahan dalam masyarakat juga terjadi dengan adanya tokoh-tokoh besar (*the great individuals*) yang seringkali disebut sebagai*heroes* (pahlawan), dan (3) perubahan sosial bisa terjadi karena munculnya *social movement*(gerakan sosial). Yakni sebuah gerakan yang digalang sebagai aksi sosial, utamanya oleh LSM/NGO, yayasan, organisasi sosial, dsb serta

Lebih lanjut Kang Jalal menyebut bahwa dalam perubahan sosial dibutuhkan berbagai strategi yang selayaknya dilakukan melalui berbagai cara, tergantung analisis situasi atas problem sosial yang ada. (1) *strategi normative-reeducative* (normatif-reedukatif). *Normative* adalah kata sifat dari *norm* (norma) yang berarti atuiran-aturan yang berlaku dalam masyarakat. Norma tersebut termasyarakatkan lewat *education,* sehingga strategi normatif digandengkan denagn upaya *reeducation* (pendidikan ulan) untuk menanamkan dan mengganti paradigma berpikir masyarakat lama dengan yang baru[. Cara atau taktik yang dilakukan adalah dengan mendidik, bukan sekedar mengubah perilaku yang

tampak melainkan juga mengubah keyakinan dan nilai sasaran perubahan, (2) *persuasive strategy* (strategi persuasif). Strategi perubahan yang dilakukan melalui penggalangan opini dan pandangan masyarakat yang utamanya dilakukan melalui media massa dan propaganda. Cara yang dilakukan adalah dengan membujuk atau mempengaruhi lewat suatu bentuk propaganda ide atau hegemoni ide.(3) perubahan sosial terjadi karena revolusi atau *people's power*. Revolusi dianggap sebagai puncak (jalan terakhir) dari semua bentuk perubahan sosial, karena ia menyentuh segenap sudut dan dimensi sosial, dan mengudang gejolak dan emosional dari semua orang yang terlibat di dalamnya.

Rekayasa Sosial: *Gagasan Konseptual*

Berangkat dari realitas bahwa perubahan sosial tidak dapat dicegah sebagai sebuah keniscayaan sejarah, baik direncanakan maupun tidak direncanakan, tulisan ini berupaya lebih dilokalisir untuk mewacanakan perubahan sosial dengan perencanaan atau desain perubahan sosial. Istilah populernya adalah rekayasa sosial.

Istilah "rekayasa sosial (*social engineering*)" seringkali dipandang negatif karena lebih banyak digunakan untuk menunjuk perilaku yang manipulatif. Padahal, secara konseptual, istilah "rekayasa sosial" adalah suatu konsep yang netral yang mengandung makna upaya mendesain suatu perubahan sosial sehingga efek yang diperoleh dari perubahan tersebut dapat diarahkan dan diantisipasi. Konsep rekayasa sosial, dengan demikian, menunjuk pada suatu upaya mendesain atau mengkondisikan terjadinya perubahan struktur dan kultur masyarakat secara terencana. Rekayasa sosial (*social engineering*) adalah salah satu cara yang bisa dilakukan untuk menciptakan masyarakat yang bersih, kuat, disiplin dan berbudaya. Dalam prinsip berpikir sistem, perubahan yang signifikan hanya dapat dilakukan oleh individu dan masyarakat itu sendiri, bukan menunggu peran struktur saja. Untuk membentuk struktur yang kuat, diperlukan elemen kebaruan (*emergent properties*) yang lahir dari individu dan komunitas yang sadar/belajar secara terus menerus (*the lifelong learner*). Komunitas ini dapat dirancang dengan menggunakan pendekatan dan penerapan beberapa prinsip organisasi pembelajaran (*learning organisation*) dan berpikir sistem (*system thinking*) yang dirajut dan dikonstruksi dalam konsep dan metode pembelajaran primer.

Dari Problem Sosial, Unsur-Unsur Sosial hingga Aksi Sosial

Pada dasarnya rekayasa sosial hanya dapat diselenggarakan kepada masyarakat yang didalamnya terdapat sejumlah problem (sosial). Problem-problem sosial tersebut memberikan dampak bagi perjalanan panjang (dinamika) dalam masyarakat. Tapa ada problem sosial, tidak akan ada orang berpikir untuk

melakukan rekayasa sosial. Artinya, problem sosial menjadi faktor utama untuk segera diatas dalam melakukan rekayasa sosial.

Problem sosial biasanya muncul akibat terjadinya kesenjangan antara apa yang seharusnya terjadi dalam masyarakat (*das sollen*) dengan kondisi yang sebenarnya terjadi (*das sein*). Misalnya; awalnya masyarakat berharap agar arus lalu lintas di Metropolitan Surabaya berjalan aman, tertib dan lancar. Semua pengguna jalan raya berjalan dengan mentaati aturan yang berlaku, ada atau tidak ada petuga. Sayangnya, apa yang diinginkan oleh masyarakat bertolak belakang dengan realitas yang terjadi. Betapa banyak pelanggaran lalu lintas terjadi akibat ketidaktaatan mereka pada peraturan. Akibatnya terjadi perbedaan antara yang ideal dengan realitas. Kesenjangan tersebut merupakan suatu problem sosial yang mesti segera di atasi. Itulah sebabnya, dibuatlah sebuah skenario (strategi) sebagai bagian rekayasa sosial melalui kampanye *safety riding.*

Dengan demikian, dalam melakukan rekayasa sosial, analisis atas situasi (problem sosial) dalam masyarakat tidak boleh ditinggalkan. Sebab, bisa jadi tanpa analisis situasi ini sebuah rekayasa sosial akan mengalami kegagalan. Ibarat sebuah adagium *salah di tingkat hulu akan berakhir fatal di tingkat hilir.* Salah dalam membaca sebab musabab sehingga terlahir problem sosial akan berakibat kesalahan dalam menentukan rekayasa sosial yang dijalankannya. Tanpa pembicaraan mengenai problem sosial ini, alih-alih melakukan rekayasa sosial untuk menyelesaikan problem sosial, kita mungkin malah menambah panjang munculnya problem sosial baru. Dalam melakukan pemecahan atas problem sosial ada kalanya memang dituntut aksi sosial (aksi kolektif) yakni tindakan kolektif (bersama) untuk mengatasi problem sosial, sehingga perubahan sosial bisa digerakkan bersama sesuai dengan keinginan bersama.

Philip Kotler memberikan gambaran unsur-unsur sosial dan aksi sosial yang dapat dilakukan dalam melakukan rekayasa sosial; (1) *cause* (sebab), yakni upaya atau tujuan sosial –yang dipercayai oleh pelaku perubahan- dapat memberikan jawaban pada problem sosial, (2) *change agency* (pelaku perubahan), yakni organisasi yang misi utamanya memajukan sebab sosial, (3)*Change target* (sasaran perubahan**);** individu, kelompok atau lembaga yang ditunjuk sebagai sasaran upaya perubahan, (4) *Channel* (saluran); media untuk menyampaikan pengaruh dan dari setiap pelaku perubahan ke sasaran perubahan, dan (5) *Change strategy* (strategi perubahan); teknik utama untuk mempengaruhi yang diterapkan oleh pelaku perubahan untuk menimbulkan dampak pada sasaran perubahan.

Sebagai catatan tambahan, dalam melakukan rekayasa sosial –hal lazim yang marak digunakan oleh *LSM/NGO* atau organisasi sosial- adalah melakukan analisis situasi dengan pendekatan analisis SWOT yakni *Streght* (kekuatan), *Weakness* (kelemahan), *Oppurtunity* (peluang) dan

Treath (ancaman). Analisis ini dilakukan untuk mengukur seberapa besar kemampuan atau potensi kita dalam melakukan rekayasa sosial. Melalui analisa ini, minimal kita dapat menentukan bentuk-bentuk rekayasa sosial yang hendak dijalankan. Namun demikian, ada berbagai pendekatan dalam melakukan rekayasa sosial tergantung dari gaya dan prototipe masing-masing pelaku perubahan sosial sekaligus masyarakat yang akan dirancang perubahan sosialnya.

Epilog

Namun demikian dalam melakukan rekayasa sosial harus dihindarkan berbagai bentuk kesalahan (asumsi) yang kemudian disebut sebagai kesesatan berpikir (*fallacy*). Artinya, harus dicermati dan diwaspadai juga, bahwa dalam masyarakat yang hendak dirancang rekayasa sosialnya (misal korban) masih mengendapnya berbagai bentuk pola pikir yang dapat mengganggu jalannya rekayasa sosial. Misalnya, *fallacy of dramatic instance* (kecenderungan untuk melakukan over generalisasi), *fallacy of Retrospektif Determinisme*(kecenderungan yang menganggap bahwa masalah sosial yang terjadi sebagai sesuatu yang secara historis memang selalu ada, tidak bisa dihindari, dan merupakan akibat dari sejarah yang cukup panjang),*argumentum ad populum* (kecenderungan untuk menganggap bahwa pendapat kebanyakan masyarakat sebagai kebenaran), dsb.

Rekayasa sosial akan mendapat tantangan bisa jadi bukan berasal dari pihak luar atau kelompok sosial di luar, tetapi justru dalam masyarakat yang hendak dirancang perubahan sosial; masyarakat yang menjadi korban dari kelompok kepentingan. *Dus,* tanpa perencanaan yang matang bisa jadi bukan keberhasilan yang diperoleh justru kitalah menjadi penyebab kian melembaganya problem sosial.

ANALISIS WACANA KRITIS

Muhammad Hilal, M.Fil

Jangan sekali-kali melupakan imbuhan kata "kritis" di atas, sebab jika kalian hanya berusaha mengenal Analisis Wacana semata tidak akan ada banyak hal yang akan kalian pelajari. Tidak mencantumkan satu kata itu saja implikasinya tidak main-main.

Jika Analisis Wacana adalah sebuah studi dalam Linguistika, maka Analisis Wacana Kritis adalah studi multi disipliner yang melibatkan beragam disiplin ilmu. Jika Analisis Wacana adalah bertugas menyingkap makna kebahasaan, maka Analisis Wacana Kritis menyibak relasi kuasa yang beroperasi melalui bahasa. Dan jika Analisis Wacana adalah alatnya para linguis untuk mengutak-atik bahasa, maka Analisis Wacana Kritis adalah alatnya kaum pergerakan untuk membongkar struktur dominasi, penyalah-gunaan kekuasaan dan ketidak-setaraan relasi sosial.

Analisis Wacana Kritis menjadi penting sebagai alat pergerakan sebab setiap pergerakan harus menyasar pula segi-segi tak tampak dalam struktur ketidak-adilan. Tidak cukup kaum pergerakan mengacung-acungkan pentungan dan teriak-teriak melalui mikrofon, sementara mekanisme kuasa di sekitarnya mereproduksi wacana-wacana penindasan yang merugikan aksi perjuangan itu. Singkat kata, jika keadilan ingin diratakan di muka bumi ini, otot saja tak cukup. Kecerdasan juga diperlukan.

Jadi, apakah itu Analisis Wacana Kritis? Gampangnya, frase itu berarti suatu upaya untuk menyingkap relasi kuasa yang dioperasikan melalui bahasa. Bahasa yang digunakan oleh seseorang, entah itu tertulis maupun diucapkan, sebetulnya adalah alat untuk memengaruhi orang lain. Ada efek yang diharapkan ketika bahasa itu diucapkan. Tindak berbahasa bukan sekadar menggambarkan atau merepresentasikan realitas (sebagaimana dikonsepsikan oleh kaum Positivis), namun lebih dari itu adalah suatu medium untuk memberikan pengaruh kepada objeknya. Ketika seseorang membaca suatu tulisan, misalnya, baris-baris tulisan yang tertera di dalamnya sejatinya sedang menyebarkan "kuasa" yang bisa mengontrol, mendisiplinkan ataupun memosisikan pembaca agar bertindak sesuai ideologi/kuasa yang bersembunyi di dalamnya. Mereka yang tidak mampu membaca secara kritis secara tidak sadar akan dicengkram pikirannya, kemudian dikontrol, dinormalisasi dan didisiplinkan.

Sejauh bahasa dimengerti sebagaimana pengertian di atas, sebetulnya tidak ada masalah. Watak bahasa memang selalu memberikan pengaruh kepada audiens/pembacanya. Namun, jika kontrol, normalisasi dan pendisiplinan itu mengabsahkan tindakan ketidak-adilan, menormalkan ketidak-setaraan, serta

mendukung penyalah-gunaan kekuasaan, pada saat itulah relasi kuasa harus dibongkar.

Asumsi Dasar Analisis Wacana Kritis:

1. *Bahasa adalah suatu tindakan*. Tidak seperti asumsi postivistik yang menganggap bahwa bahasa berfungsi untuk merepresentasikan realitas, dalam konteks Analisis Wacana Kritis bahasa dipahami sebagai sebuah tindakan yang memiliki tujuan dan dilakukan secara sadar. Bahasa adalah medium interaksi antar perorangan, di mana yang satu berkirim pesan dan yang lain menerimanya. Dengan pandangan ini, memahami bahasa berarti tidak sekadar memahami makna yang dikandungnya, namun juga efek-efek yang dihasilkannya.
2. *Kuasa beroperasi melalui bahasa.* Melalui bahasa, seseorang bisa mengontrol orang lain, entah secara sadar maupun tidak sadar. Hal ini membuktikan bahwa bahasa merupakan lokus operasi kuasa, merupakan tempat di mana kuasa mengotrol dan mendominasi. Kita harus berterima kasih kepada Michel Foucault yang telah memberikan kita bekal teoritis mengenai kuasa ini dan bagaimana ini beroperasi. Menurut Foucault, kuasa menyebar di mana-mana seperti jejaring yang saling berjalin dan terhubung satu sama lain. Kuasa tidaklah terpusat dan tidak bisa dimiliki oleh manusia. Justru manusialah yang selalu tunduk dan menyerah di hadapan kuasa. Mereka yang sedang menyebarkan suatu wacana sebetulnya hanyalah agen bagi kuasa untuk menyebar.
3. *Normalisasi.* Wacana itu adalah lokus beroperasinya kuasa. tujuannya adalah menormalisasi hal-hal yang tidak alami dan *constructed* (dikonstruksi secara sosial). Melalui kuasa, segala hal yang sebetulnya dibuat dan dikonstruksi menjadi tampak normal, alami dan merupakan kodrat yang memang harus begitu. Memalui Analisis Wacana Kritis, segala bentuk normalisasi itu akan terbongkar, sebab kealamian, kenormalan dan kodrat tidak lebih dari sekadar mekanisme kuasa untuk mengontrol, mendominasi dan mendisiplinkan objeknya.
4. *Ideologi.* Wacana adalah salah satu tema sentral dalam Analisis Wacana Kritis. Tidak banyak yang bisa diberikan Analisis Wacana Kritis jika tidak melibatkan ideology, sebab wacana yang dilepaskan ke publik kebanyakan mencerminkan ideologi yang dianut oleh kelompok dominan. Ideologi merupakan nilai-nilai abstrak yang dianut oleh suatu kelompok sosial. Dalam banyak kasus, ideologi kelompok dominan menguasai persebaran suatu wacana sehingga kelompok yang didominasi kerap menjadi kelompok yang dikontrol dan dikendalikan. Analisis

Wacana Kritis mampu menyibak ideologi yang bersembunyi dalam wacana.

Oleh sebab Analisis Wacana Kritis membawa asumsi-asumsi teoritis di atas, maka pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para analisnya, paling tidak, ada dua: (1) bagaimana kelompok-kelompok berkuasa mengontrol wacana publik, dan (2) bagaimana wacana-wacana itu mengontrol pikiran dan tindakan orang-orang yang kurang berkuasa.

Jika pertanyaan pertama terjawab, maka kita akan tahu bagaimana kelompok berkuasa mengatur, memproduksi dan mendistribusikan wacana tertentu untuk mengontrol dan mengendalikan kelompok lain. Mereka yang mampu melemparkan suatu wacana ke publik akan mampu mengendalikan kelompok lain secara persuasif tanpa menggunakan kekerasan. Kenapa hal itu bisa terjadi?

Sebab wacana mampu mengontrol pikiran orang lain. Orang-orang ini akan menerima begitu saja keyakinan-keyakinan, pengetahuan dan opini-opini tertentu yang dianggap disampaikan oleh para pakar yang otoritatif dan kredibel. Penerimaan semacam ini pada dasarnya adalah kontrol pikiran yang mampu dilakukan oleh suatu wacana.

Dengan adanya asumsi-asumsi di atas, kita bisa melakukan Analisis Wacana Kritis di beberapa wilayah berikut ini:

Pertama, wacana politik. Politik adalah pentas di mana kekuasaan dikontestasi dan diperebutkan oleh berbagai pihak kepentingan. Oleh karena itu, wacana yang tersebar di wilayah politik tentu adalah wacana dalam rangka dominasi dan penundukan. Tentu Analisis Wacana Kritis adalah alat yang tepat untuk membongkar relasi kuasa yang bersembunyi di balik wacana politik melalui teks dan pidato politik.

Kedua, Wacana Media. Media adalah gudangnya wacana. Hampir dalam bidang apapun, media memuat dan mereportasekannya. Tentunya, media akan selalu menjadi pertarungan relasi kuasa dalam rangka dominasi dan hegemoni. Analisis Wacana Kritis bisa menjadi alat untuk membongkar semua relasi kuasa tersebut dengan sangat ampuh.

Ketiga,, wacana ketak-setaraan gender. Relasi antara kaum lelaki dan perempuan kerap diwarnai dengan ketimpangan. Dominasi kaum lelaki dalam banyak kesempatan selalu lebih kuat ketimbang kaum perempuan. Parahnya, kondisi ketidak-setaraan ini kadang diamini dan didukung oleh kaum perempuan sendiri. Hal ini tidak lain karena wacana yang tersebar tentang relasi kaum lelaki dan kaum perempuan mengusung ideology patriarkis yang mengunggulkan kaum lelaki ketimbang kaum perempuan. Inilah pintu yang bisa dilewati oleh Analisis Wacana Kritis.

Sebetulnya, masih banyak lagi wilayah garapan yang bisa dilakukan oleh Analisis Wacana Kritis, sebab wacana mencakup hampir segala aspek kehidupan manusia, sebagaimana bahasa itu sendiri mencakup hampir segala segi manusia. Oleh karena itu, Analisis Wacana Kritis sebetulnya adalah bidang studi yang sangat luas dan multi disipliner, asalkan relasi kuasa sedang berlangsung di sana.

MANAJEMEN KONFLIK

Oleh: Husnul Hakim Syadad

A. Definisi Konflik

Menurut Webster (1966) dalam Dean G. Pruitt dan Feffrey Z. Rubin, istilah "conflict" dalam bahasa aslinya berarti suatu "perkelahian, peperangan, atau perjuangan" yaitu berupa konfrontasi fisik antara beberapa pihak. Arti kata itu kemudian berkembang menjadi "ketidaksepakatan yang tajam atau oposisi atas berbagai kepentingan".

Dean G. Pruitt dan Feffrey Z. Rubin memaknai konflik sebagai persepsi mengenai perbedaan kepentingan (perceived divergence of interest) atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat dicapai secara simultan. Konflik dapat terjadi pada berbagai macam keadaan dan pada berbagai tingkat kompleksitas. Konflik merupakan sebuah duo yang dinamis.

B. Definisi Manajemen Konflik

Manajemen konflik merupakan serangkaian aksi dan reaksi antara pelaku maupun pihak luar dalam suatu konflik. Manajemen konflik termasuk pada suatu pendekatan yang berorientasi pada proses yang mengarahkan pada bentuk komunikasi (termasuk tingkah laku) dari pelaku maupun pihak luar dan bagaimana mereka mempengaruhi kepentingan (interests) dan interpretasi.

Bagi pihak luar (di luar yang berkonflik) sebagai pihak ketiga, yang diperlukannya adalah informasi yang akurat tentang situasi konflik. Hal ini karena komunikasi efektif di antara pelaku dapat terjadi jika ada kepercayaan terhadap pihak ketiga.

Menurut Ross (1993) bahwa manajemen konflik merupakan langkah-langkah yang diambil para pelaku atau pihak ketiga dalam rangka mengarahkan perselisihan ke arah hasil tertentu yang mungkin atau tidak mungkin menghasilkan suatu akhir berupa penyelesaian konflik dan mungkin atau tidak mungkin menghasilkan ketenangan, hal positif, kreatif, bermufakat, atau agresif.

Manajemen konflik dapat melibatkan bantuan diri sendiri, kerjasama dalam memecahkan masalah (dengan atau tanpa bantuan pihak ketiga) atau pengambilan keputusan oleh pihak ketiga.

Suatu pendekatan yang berorientasi pada proses manajemen konflik menunjuk pada pola komunikasi (termasuk perilaku) para pelaku dan bagaimana mereka mempengaruhi kepentingan dan penafsiran terhadap konflik.

C. Transformasi Konflik

Fisher dkk (2001:7) menggunakan istilah transformasi konflik secara lebih umum dalam menggambarkan situasi secara keseluruhan.

1. Pencegahan Konflik, bertujuan untuk mencegah timbulnya konflik yang keras.
2. Penyelesaian Konflik, bertujuan untuk mengakhiri perilaku kekerasan melalui persetujuan damai.
3. Pengelolaan Konflik, bertujuan untuk membatasi dan menghindari kekerasan dengan mendorong perubahan perilaku positif bagi pihak-pihak yang terlibat.
4. Resolusi Konflik, menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru dan yang bisa tahan lama diantara kelompok-kelompok yang bermusuhan.
5. Transformasi Konflik, mengatasi sumber-sumber konflik sosial dan politik yang lebih luas dan berusaha mengubah kekuatan negatif dari peperangan menjadi kekuatan sosial dan politik yang positif.

Tahapan-tahapan diatas merupakan satu kesatuan yang harus dilakukan dalam mengelola konflik. Sehingga masing-masing tahap akan melibatkan tahap sebelumnya misalnya pengelolaan konflik akan mencakup pencegahan dan penyelesaian konflik.

D. Proses Manajemen Konflik

Sementara Minnery (1980:220) menyatakan bahwa manajemen konflik merupakan proses, sama halnya dengan perencanaan merupakan proses. Minnery (1980:220) juga berpendapat bahwa proses manajemen konflik perencanaan merupakan bagian yang rasional dan bersifat iteratif, artinya bahwa pendekatan model manajemen konflik perencanaan secara terus menerus mengalami penyempurnaan sampai mencapai model yang representatif dan ideal.

Sama halnya dengan proses manajemen konflik yang telah dijelaskan diatas, bahwa manajemen konflik perencanaan meliputi beberapa langkah yaitu: penerimaan terhadap keberadaan konflik (dihindari atau ditekan/didiamkan), klarifikasi karakteristik dan struktur konflik, evaluasi konflik (jika bermanfaat maka dilanjutkan dengan proses selanjutnya), menentukan aksi yang dipersyaratkan untuk mengelola konflik, serta menentukan peran perencana sebagai partisipan atau pihak ketiga dalam mengelola konflik.

Keseluruhan proses tersebut berlangsung dalam konteks perencanaan dan melibatkan perencana sebagai aktor yang mengelola konflik baik sebagai partisipan atau pihak ketiga.

E. Teori-teori Utama Mengenai Sebab-sebab Konflik

1. Teori hubungan masyarakat. Menganggap bahwa konflik disebabkan oleh polarisasi yang terus terjadi, ketidakpercayaan dan permusuhan di

antara kelompok yang berbeda dalam suatu masyarakat. Sasaran: meningkatkan komunikasi dan saling pengertian antara kelompok yang mengalami konflik, serta mengusahakan toleransi dan agar masyarakat lebih bisa saling menerima keragaman yang ada didalamnya.

2. Teori kebutuhan manusia. Menganggap bahwa konflik yang berakar disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia (fisik, mental dan sosial) yang tidak terpenuhi atau dihalangi. Hal yang sering menjadi inti pembicaraan adalah keamanan, identitas, pengakuan, partisipasi, dan otonomi. Sasaran: mengidentifikasi dan mengupayakan bersama kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi, serta menghasilkan pilihan-pilihan untuk memenuhi kebutuhan itu.\
3. Teori negosiasi prinsip. Menganggap bahwa konflik disebabkan oleh posisi-posisi yang tidak selaras dan perbedaan pandangan tentang konflik oleh pihak-pihak yang mengalami konflik. Sasaran: membantu pihak yang berkonflik untuk memisahkan perasaan pribadi dengan berbagai masalah dan isu dan memampukan mereka untuk melakukan negosiasi berdasarkan kepentingan mereka daripada posisi tertentu yang sudah tetap. Kemudian melancarkan proses kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak atau semua pihak.
4. Teori identitas. Berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh identitas yang terancam, yang sering berakar pada hilangnya sesuatu atau penderitaan di masa lalu yang tidak diselesaikan. Sasaran: melalui fasilitas lokakarya dan dialog antara pihak-pihak yang mengalami konflik, sehingga dapat mengidentifikasi ancaman dan ketakutan di antara pihak tersebut dan membangun empati dan rekonsiliasi di antara mereka.
5. Teori kesalahpahaman antarbudaya. Berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh ketidakcocokan dalam cara-cara komunikasi di antara berbagai budaya yang berbeda. Sasaran: menambah pengetahuan kepada pihak yang berkonflik mengenai budaya pihak lain, mengurangi streotip negatif yang mereka miliki tentang pihak lain, meningkatkan keefektifan komunikasi antarbudaya.
6. Teori transformasi konflik. Berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang muncul sebagai masalah sosial, budaya dan ekonomi.

F. Penyebab Konflik

Konflik dapat terjadi hanya karena salah satu pihak memiliki aspirasi tinggi karena allternatif yang bersifat integrative dinilai sulit didapat. Ketika konflik

semacam ini terjadi, maka ia akan semakin mendalam bila aspirasi sendiri atau aspirasi pihak lain bersifat kaku dan menetap.

Aspirasi dapat mengakibatkan konflik karena salah satu dari dua alasan, yaitu masing-masing pihak memiliki alasan untuk percaya bahwa mereka mampu mendapatkan sebuah objek bernilai untuk diri mereka sendiri atau mereka percaya bahwa berhak memeiliki objek tersebut. Pertimbangan pertama bersifat realistis, sedangkan pertimbangan kedua bersifat idealis.

1. Faktor Manusia
   - Ditimbulkan oleh atasan, terutama karena gaya kepemimpinannya.
   - Personil yang mempertahankan peraturan-peraturan secara kaku.
   - Timbul karena ciri-ciri kepriba-dian individual, antara lain sikap egoistis, temperamental, sikap fanatik, dan sikap otoriter.

2. Faktor Organisasi
   - Persaingan dalam menggunakan sumberdaya. Apabila sumberdaya baik berupa uang, material, atau sarana lainnya terbatas atau dibatasi, maka dapat timbul persaingan dalam penggunaannya. Ini merupakan potensi terjadinya konflik antar unit/departemen dalam suatu organisasi.
   - Perbedaan tujuan antar unit-unit organisasi. Tiap-tiap unit dalam organisasi mempunyai spesialisasi dalam fungsi, tugas, dan bidangnya. Perbedaan ini sering mengarah pada konflik minat antar unit tersebut. Misalnya, unit penjualan menginginkan harga yang relatif rendah dengan tujuan untuk lebih menarik konsumen, sementara unit produksi menginginkan harga yang tinggi dengan tujuan untuk memajukan perusahaan.
   - Interdependensi tugas. Konflik terjadi karena adanya saling ketergantungan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Kelompok yang satu tidak dapat bekerja karena menunggu hasil kerja dari kelompok lainnya.
   - Perbedaan nilai dan persepsi. Suatu kelompok tertentu mempunyai persepsi yang negatif, karena merasa mendapat perlakuan yang tidak “adil”. Para manajer yang relatif muda memiliki presepsi bahwa mereka mendapat tugas-tugas yang cukup berat, rutin dan rumit, sedangkan para manajer senior mendapat tugas yang ringan dan sederhana.
   - Kekaburan yurisdiksional. Konflik terjadi karena batas-batas aturan tidak jelas, yaitu adanya tanggung jawab yang tumpang tindih.
   - Masalah “status”. Konflik dapat terjadi karena suatu unit/departemen mencoba memperbaiki dan meningkatkan status, sedangkan

unit/departemen yang lain menganggap sebagai sesuatu yang mengancam posisinya dalam status hirarki organisasi.

- Hambatan komunikasi. Hambatan komunikasi, baik dalam perencanaan, pengawasan, koordinasi bahkan kepemimpinan dapat menimbulkan konflik antar unit/ departemen.

G. Akibat Konflik

1. Akibat Negatif Konflik
   a. Menghambat komunikasi.
   b. Mengganggu kohesi (keeratan hubungan).
   c. Mengganggu kerjasama atau "team work".
   d. Mengganggu proses produksi, bahkan dapat menurunkan produksi.
   e. Menumbuhkan ketidakpuasan terhadap pekerjaan.
   f. Individu atau personil menga-lami tekanan (stress), mengganggu konsentrasi, menimbulkan kecemasan, mangkir, menarik diri, frustrasi, dan apatisme.
   g. Apabila konflik mengarah pada kondisi destruktif, maka hal ini dapat berdampak pada penurunan efektivitas kerja dalam organisasi baik secara perorangan maupun kelompok, berupa penolakan, resistensi terhadap perubahan, apatis, acuh tak acuh, bahkan mungkin muncul luapan emosi destruktif, berupa demonstrasi.

2. Akibat Positif Konflik
   a. Membuat organisasi tetap hidup dan harmonis.
   b. Berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungan.
   c. Melakukan adaptasi, sehingga dapat terjadi perubahan dan perbaikan dalam sistem dan prosedur, mekanisme, program, bahkan tujuan organisasi.
   d. Memunculkan keputusan-keputusan yang bersifat inovatif.
   e. Memunculkan persepsi yang lebih kritis terhadap perbedaan pendapat.
   f. Konflik bisa jadi merupakan sumber energi dan kreativitas yang positif apabila dikelola dengan baik. Misalnya, konflik dapat menggerakan suatu perubahan: Membantu setiap orang untuk saling memahami tentang perbedaan pekerjaan dan tanggung jawab mereka, Memberikan saluran baru untuk komunikasi, Menumbuhkan semangat baru pada staf, Memberikan kesempatan untuk menyalurkan emosi, Menghasilkan distribusi sumber tenaga yang lebih merata dalam organisasi.

H. Strategi Mengatasi Konflik

Munculnya konflik tidak selalu bermakna negatif, artinya jika konflik dapat dikelola dengan baik, maka konflik dapat memberi kontribusi positif terhadap kemajuan sebuah organisasi. Beberapa startegei mengatasi konflik antara lain adalah:

- ✓ Contending (bertanding) yaitu mencoba menerapkan solusi yang lebih disukai salah satu pihak atau pihak lain.
- ✓ Yielding (mengalah) yaitu menurunkan aspirasi sendiri dan bersedia menerima kurang dari apa yang sebetulnya diinginkan.
- ✓ Problem Solving (pemecahan masalah) yaitu mencari alternatif yang memuaskan aspirasi kedua belah pihak
- ✓ With Drawing (menarik diri) yaitu memilih meninggalkan situasi konflik baik secara fisik maupun psikologis. With drawing melibatkan pengabaian terhadap kontroversi, dan
- ✓ Inaction (diam) tidak melakukan apapun, dimana masing-masing pihak saling menunggu langkah berikut dari pihak lain, entah sampai kapan.

1. Konflik Sebagai Suatu Oposisi

Konflik, dapat dikatakan sebagai suatu oposisi atau pertentangan pendapat antara orang-orang, kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi, yang disebabkan oleh adanya berbagai macam perkembangan dan perubahan dalam bidang manajemen serta menimbulkan perbedaan pendapat, keyakinan, dan ide.

Dalam pada itu, ketika individu bekerja sama satu sama lain dalam rangka mewujudkan tujuannya, maka wajar seandainya dalam waktu yang cukup lama terjadi perbedana-perbedaan pendapat di antara mereka. Ibarat piring, banyak yang pecah atau retak, hanya karena bersentuhan dengan piring lainnya.

2. Tahap-tahap Berlangsungnya Konflik

Menurut Mulyasa pada umumnya konflik berlangsung dalam lima tahap, yaitu tahap potensial, konflk terasakan, pertenangan, konflik terbuka, dan akibat konflik.

a. Tahap potensial, yaitu munculnya perbedaan di antara individu, organisasi, dan lingkunan merupakan potensi terjadinya konflik.
b. Konflik terasakan, yaitu kondisi ketika perbedaan yang muncul dirasakan oleh individu, dan mereka mulai memikirkannya.
c. Pertentangan, yaitu ketika konflik berkembang menjadi perbedaan pendapat di anatara individu atau kelompok yang saling bertentangan.

d. Konflik terbuka, yaitu tahapan ketika pertentangan berkembang menjadi permusuhan secara terbuka.
e. Akibat konflik, yaitu tahapan ketika konflik menimbulkan dampak terhadap kehidupan dan kinerja organisasi. Jika konflik terkelola dengan baik, maka akan menimbulkan keuntungan, seperti tukar pikiran, ide dan menimbulkan kreativitas. Tetapi jika tidak dikelola dengan baik, dan melampaui batas, maka akan menimbulkan kerugian seperti saling permusuhan.

3. Latar Belakang Konflik

Konflik dilatarbelakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi. perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya adalah menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, dan lain sebagainya.

Konflik adalah sesuatu yang wajar terjadi di masyarakat, konflik hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri. Konflik bertentangan dengan integrasi.

Konflik dan Integrasi berjalan sebagai sebuah siklus di masyarakat. Konflik yang terkontrol akan menghasilkan integrasi. sebaliknya, integrasi yang tidak sempurna dapat menciptakan konflik.

4. Faktor-faktor Penyebab Konflik

Adapun faktor-faktor penyebab konflik antara lain:

- Perbedaan individu, yang meliputi perbedaan pendirian dan perasaan;
- Perbedaan latar belakang kebudayaan sehingga membentuk pribadi-pribadi yang berbeda pula. seseorang sedikit banyak akan terpengaruh dengan pola-pola pemikiran dan pendirian kelompoknya;
- Perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok, diantaranya menyangkut bidang ekonomi, politik, dan sosial; dan
- Perubahan-perubahan nilai yang cepat dan mendadak dalam masyarakat.

5. Tingkatan Konflik

a. Konflik intrapersonal, yaitu konflik internal yang terjadi dalam diri seseorang. Konflik intrapersonal akan terjadi ketika individu harus memilih dua atau lebih tujuan yang saling bertentangan, dan bimbang mana yang harus dipilih untuk dilakukan.
b. Konflik interpersonal, yaitu konflik yang terjadi antar individu. Konflik yang terjadi ketika adanya perbedaan tentang isu tertentu, tindakan dan tujuan dimana hasil bersama sangat menentuan.

c. Konflik intragrup, yaitu konflik antara angota dalam satu kelompok. Setiap kelompok dapat mengalami konflik substantif atau efektif. Konflik substantif terjadi karena adanya latar belakang keahlian yang berbeda, ketika anggota dari suatu komite menghasilkan kesimpulan yang berbeda atas data yang sama. Sedangkan konflik efektif terjadi karena tangapan emosional terhadap suatu situasi tertentu.
d. Konflik intergrup, yaitu konflik yang terjadi antar kelompok. Konflik intergrup terjadi karena adanya saling ketergantungan, perbedaan persepsi, perbedaan tujuan, da meningkatkatnya tuntutan akan keahlian.
e. Konflik intraorganisasi, yaitu konflik yang terjadi antar bagian dalam suatu organisasi.
f. Konflik interorganisasi, yang terjadi antar organisasi. Konflik inter organisasi terjadi karena mereka memiliki saling ketergantungan satu sama lain, konflik terjadi bergantung pada tindakan suatu organisasi yang menyebabkan dampak negatif terhadap organisasi lain. Misalnya konflik yang terjadi antara lembaga pendidikan dengan salah satu organisasi masyarakat. Konflik Intraorganisasi meliputi empat sub jenis :
   - ✓ Konflik vertikal, yang terjadi antara pimpinan dan bawahan yang tidak sependapat tentang cara terbaik untuk menyelesaikan sesuatu. Misalnya konflik antara Rektor dengan tenaga kependidikan;
   - ✓ Konflik horizontal, yang terjadi antar karyawan atau departemen yang memiliki hierarkhi yang sama dalam organisasi Misalnya antara tenaga kependidikan;
   - ✓ Konflik lini-staf, yang sering terjadi karena adanya perbedaan persepsi tentang keterlibatan staf dalam proses pengambilan keputusan oleh manajer lini. Misalnya konflik antara Rektor dengan tenaga administrasi;
   - ✓ Konflik peran, yang terjadi karena seserang memiliki lebih dari satu peran. Misalnya Rektor menjabat sebagai ketua dewan pendidikan;

6. Tipe Pengelolaan Konflik

Manajemen harus mampu meredam persaingan yang sifatnya berlebihan (yang melahirkan konflik yang bersifat disfungsional) yang justru merusak spirit sinergisme organisasi tanpa melupakan continous re-empowerment. Ada 6 tipe pengelolaan konflik yang dapat dipilih dalam menangani konflik yang muncul (Dawn M. Baskerville, 1993:65) yaitu :

a. Avoiding; gaya seseorang atau organisasi yang cenderung untuk menghindari terjadinya konflik. Hal-hal yang sensitif dan potensial

menimbulkan konflik sedapat mungkin dihindari sehingga tidak menimbulkan konflik terbuka.

b. Accomodating; gaya ini mengumpulkan dan mengakomodasikan pendapat-pendapat dan kepentingan pihak-pihak yang terlibat konflik, selanjutnya dicari jalan keluarnya dengan tetap mengutamakan kepentingan pihak lain atas dasar masukan-masukan yang diperoleh.
c. Compromising; merupakan gaya menyelesaikan konflik dengan cara melakukan negosiasi terhadap pihak-pihak yang berkonflik, sehingga kemudian menghasilkan solusi (jalan tengah) atas konflik yang sama-sama memuaskan (lose-lose solution).
d. Competing; artinya pihak-pihak yang berkonflik saling bersaing untuk memenangkan konflik, dan pada akhirnya harus ada pihak yang dikorbankan (dikalahkan) kepentingannya demi tercapainya kepentingan pihak lain yang lebih kuat atau yang lebih berkuasa (win-lose solution).
e. Collaborating; dengan cara ini pihak-pihak yang saling bertentangan akan sama-sama memperoleh hasil yang memuaskan, karena mereka justru bekerja sama secara sinergis dalam menyelesaikan persoalan, dengan tetap menghargai kepentingan pihak lain. Singkatnya, kepentingan kedua pihak tercapai (menghasilkan win-win solution).
f. Conglomeration (mixtured type); cara ini menggunakan kelima style bersama-sama dalam penyelesaian konflik.

Gaya dalam Penyelesaian Konflik

Perlu kita ingat bahwa dalam memilih style yang akan dipakai oleh seseorang atau organisasi di dalam pengelolaan konflik akan sangat bergantung dan dipengaruhi oleh persepsi, kepribadian/karakter (personality), motivasi, kemampuan (abilities) atau pun kelompok acuan yang dianut oleh seseorang atau organisasi.

Dapat dikatakan bahwa pilihan seseorang atas gaya mengelola konflik merupakan fungsi dari kondisi khusus tertentu dan orientasi dasar seseorang atau perilakunya dalam menghadapai konflik tersebut yang juga berkaitan dengan nilai (value) seseorang tersebut.

Pada level subkultur (subculture), shared values dapat dipergunakan untuk memprediksi pilihan seseorang pada gaya dalam menyelesaikan konflik yang dihadapinya. Subkultur seseorang diharapkan dapat mempengaruhi perilakunya sehingga akan terbentuk perilaku yang sama dengan budayanya (M. Kamil Kozan, 2002:93-96).

Taktik Penyelesaian Konflik

a. Rujuk
   Merupakan suatu usaha pendekatan dan hasrat untuk kerja-sama dan menjalani hubungan yang lebih baik, demi kepentingan bersama.
b. Persuasi
   Usaha mengubah po-sisi pihak lain, dengan menunjukkan kerugian yang mungkin timbul, dengan bukti faktual serta dengan menunjukkan bahwa usul kita menguntungkan dan konsisten dengan norma dan standar keadilan yang berlaku.
c. Tawar-menawar
   Suatu penyelesaian yang dapat diterima kedua pihak, dengan saling mempertukarkan konsesi yang dapat diterima. Dalam cara ini dapat digunakan komunikasi tidak langsung, tanpa mengemukakan janji secara eksplisit.
d. Pemecahan masalah terpadu
   Usaha menyelesaikan masalah dengan memadukan kebutuhan kedua pihak. Proses pertukaran informasi, fakta, perasaan, dan kebutuhan berlangsung secara terbuka dan jujur. Menimbulkan rasa saling percaya dengan merumuskan alternatif pemecahan secara bersama dengan keuntungan yang berimbang bagi kedua pihak.
e. Penarikan diri
   Suatu penyelesaian masalah, yaitu salah satu atau kedua pihak menarik diri dari hubungan. Cara ini efektif apabila dalam tugas kedua pihak tidak perlu berinteraksi dan tidak efektif apabila tugas saling bergantung satu sama lain.
f. Pemaksaan dan penekanan
   Cara ini memaksa dan menekan pihak lain agar menyerah; akan lebih efektif bila salah satu pihak mempunyai wewenang formal atas pihak lain. Apabila tidak terdapat perbedaan wewenang, dapat dipergunakan ancaman atau bentuk-bentuk intimidasi lainnya. Cara ini sering kurang efektif karena salah satu pihak hams mengalah dan menyerah secara terpaksa.
g. Intervensi (campur tangan) pihak ketiga
   Apabila fihak yang bersengketa tidak bersedia berunding atau usaha kedua pihak menemui jalan buntu, maka pihak ketiga dapat dilibatkan dalam penyelesaian konflik. Penyelesaian Konflik dengan Pihak Ketiga sebagai berikut:
   1. Arbitrase (arbitration): Pihak ketiga mendengarkan keluhan kedua pihak dan berfungsi sebagai “hakim” yang mencari pemecahan

mengikat. Cara ini mungkin tidak menguntungkan kedua pihak secara sama, tetapi dianggap lebih baik daripada terjadi muncul perilaku saling agresi atau tindakan destruktif.

2. Penengahan (mediation): Menggunakan mediator yang diundang untuk menengahi sengketa. Mediator dapat membantu mengumpulkan fakta, menjalin komunikasi yang terputus, menjernihkan dan memperjelas masalah serta mela-pangkan jalan untuk pemecahan masalah secara terpadu. Efektivitas penengahan tergantung juga pada bakat dan ciri perilaku mediator.
3. Konsultasi: Tujuannya untuk memperbaiki hubungan antar kedua pihak serta mengembangkan kemampuan mereka sendiri untuk menyelesaikan konflik. Konsultan tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan dan tidak berusaha untuk menengahi. la menggunakan berbagai teknik untuk meningkatkan persepsi dan kesadaran bahwa tingkah laku kedua pihak terganggu dan tidak berfungsi, sehingga menghambat proses penyelesaian masalah yang menjadi pokok sengketa.

ANTROPOLOGI KAMPUS

Oleh : Moch Jabir, S.Pd.I

A. Antropologi, Kampus dan Norma Kampus

1. *Pengertian Antropologi*

   Ditinjau dari segi bahasa antropologi terdiri dari dua kata, yaitu antropos dan logos. Antropos yang berarti manusia dan logos yang berarti ilmu pengetahuan, jadi antropologi adalah ilmu yang mempelajari manusia dan kehidupannya atau penyelidikan tehadap manusia dan kehidupanya.Antropologi mempelajari manusia sebagai makhluk biologis sekaligus makhluk sosial. Secara garis besar antropologi bisa dibagi menjadi dua macam.

   Yang pertama ialah antropologi fisik, yang obyek kajiannya berupa manusia sebagai organisme biologis. Sedangkan kedua ialah antropologi budaya, yang obyek kajiannya terkait manusia sebagai makhluk sosial (ber)budaya. Menurut Koentjaraningrat, Antropologi adalah ilmu yang mempelajari umat manusia pada umumnya dengan mempelajari aneka warna, bentuk fisik masyarakat serta kebudayaan yang dihasilkan.

2. *Pengertian Kampus*

   Kampus, berasal dari bahasa Latin; campus yang berarti “lapangan luas”, “tegal”. Dalam pengertian modern, kampus berarti, sebuah kompleks atau daerah tertutup yang merupakan kumpulan gedung-gedung universitas atau perguruan tinggi.

   Kampus merupakan tempat belajar-mengajar berlangsungnya misi dan fungsi perguruan tinggi. Dalam rangka menjaga kelancaran fungsi-fungsi tersebut, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai lembaga pendidikan tinggi yang mengembangkan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi, memerlukan penyatuan waktu kegiatan beserta ketentuan-ketentuan di dalam kampus.

   Dalam hubungannya dengan mahasiswa, rektorat membentuk sistem yang mengatur posisinya dengan mahasiswa, dari mulai stuktural, birokrasi sampai kepada norma-norma yang diciptakan sesuai dengan kondisi sosial yang ada, misalnya pada kampus berlatar Islam tentunya ada adat-adat yang harus bernafaskan Islam, dsb. Dan, begitu pula halnya pada hubungan antara mahasiswa dengan mahasiswa.

3. *Norma Akademik (Etika Kampus)*

   Norma akademik adalah ketentuan, peraturan dan tata nilai yang harus ditaati oleh seluruh mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang berkaitan dengan aktivitas akademik. Adapun tujuan norma akademik adalah agar para mahasiswa mempunyai gambaran yang jelas tentang

hal-hal yang perlu dan/seharusnya dilakukan dalam menghadapi kemungkinan timbulnya permasalahan baik masalah-masalah akademik maupun masalah-masalah non akademik.

Masalah akademik adalah masalah yang berkaitan langsung dengan kegiatan kurikuler, Masalah non akademik adalah masalah yang terkait dengan kegiatan non kurikuler. Sedangkan Pelanggaran adalah perilaku atau perbuatan, ucapan, tulisan yang bertentangan dengan norma dan etika kampus. Etika kampus adalah ketentuan atau peraturan yang mengatur perilaku/atau tata krama yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Etika kampus meliputi 2 hal penting yaitu ketertiban dan tata krama.

Setiap lembaga pendidikan atau kampus biasanya mempunyai menentukan norma akademik (etika kampus) masing-masing sesuai dengan status kampusnya, misalnya, kampus negeri umum yang menginduk ke Dirjen Dikti Diknas RI, di samping terikat oleh aturan yang dibuat oleh Dirjen Dikti tersebut. Demikian juga kampus yang dalam koordinasi Dirjen Dikti Agama Islam Depag seperti kampus UIN, IAIN dan STAIN, juga mengikuti aturan ketentuan norma akademik yang dibuat oleh Depag. Sama halnya dengan kampus swasta milik NU seperti UWH atau STAINU yang berada dalam koordinasi APTINU (Asosiasi Perguruan Tinggi NU) juga mengikuti aturan norma akademik diatur oleh APTINU, di samping juga mengikuti aturan Dirjen Dikti dan aturan internal kampus yang biasanya disusun oleh pimpinan kampus.

Dalam kehidupan perkuliahan, mahasiswa cenderung memiliki sikap aktualisasi dan apresiatif. Yakni sikap atau tindakan unjuk kemampuan dan kehebatan sesuai bakat serta karakter pribadinya masing-masing. Hal ini merupakan sisi positif yang dimiliki oleh seorang mahasiswa. Sehingga diperlukan adanya sebuah sarana dan prasarana dalam menyalurkan bakat dan kreatifitas mereka dan nantinya diharapkan menjadi suatu hal yang produktif dalam meningkatkan pembangunan dan pendidikan negeri ini. Aktualisasi ini bisa berupa bidang olahraga dan seni, kepemimpinan, religi, hingga dana usaha yang mendukung perekonomian kampus menuju kampus yang mandiri. Sumber daya ini begitu sia-sia ketika pihak birokrat kampus tidak memanfaatkannya dengan baik, bahkan melakukan tindakan ‘pembunuhan karakter’ kepada mahasiswa. Padahal SDM seperti inilah yang nantinya mampu melakukan akselerasi pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Paling tidak, negara secara tidak langsung diuntungkan dengan berbagai macam potensi anak-anak bangsa yang artinya kaya dengan SDM.

B. Tipologi Mahasiswa

Dalam dunia kampus pasti tidak akan pernah lepas dari kata mahasiswa. Mahasiswa merupakan komponen utama, karena disitulah para mahasiswa itu berproses mengembangkan dirinya. Selain itu, mahasiswa merupakan unsur terbanyak diluar civitas akademika yang ada. Mahasiswa yang banyak itu, pastinya juga membawa karakter dan budaya yang berbeda-beda karena datang dari berbagai penjuru daerah.

Sebagai anggota PMII yang juga merupakan mahasiswa perlu memahami tipe-tipe dari mahasiswa, sehingga mampu menempatkan dirinya dalam tipe yang seperti apa. Dalam pengklasifikasian ini sifatnya tidak bisa dibilang paten, karena setiap diri kita bisa membuat tipologi sesuai dengan yang kita lihat dan rasakan. Yang paling penting dari pengklasifikasian mahasiswa ini adalah, kita mampu memetakan jenis-jenis mahasiswa sehingga mampu "bermain" dalam lingkungan tersebut.

1. *Akademis* Mahasiswa seperti ini biasanya adalah mahasiswa yang menonjol dalam bidang nilai akademik. Waktunya kebanyakan digunakan untut menuntut ilmu. Dan yang parah dari mahasiswa ini adalah, ketika mereka hanya berorientasi nilai saja.
2. *Aktivis.* Mahasiswa ini adalah mahasiswa yang bergabung dalam organisasi tertentu, baik ekstra maupun intra. Sekarang, banyak anggapan negative bagi mahasiswa aktivis ini. Mulai dari sering bolos, sampai dengan sering membantah dosen. Sayangnya pendapat ini memang digunakan oleh orang-orang yang kurang suka pada aktivis dan ingin menjatuhkannya.
3. *Hedonis* (Mahasiswa Hura-hura). Yaitu mahasiswa yang hidup dengan mengikuti perkembangan zaman, up to date, gaul dan populer, namun usaha mengikuti perkembangan zaman tidak dibarenge dengan kesadaran bahwa perkembangan zaman bersifat absurd yakni menawarkan kesenangan tanpa manfaat. Bersinggungan dengan label hedoni ini, kita mengenal istilah borjuis, yaitu golongan kaya dengan kehidupan mewah yang membangun tembok besar dengan orang-orang proletar dan anti borjuasi, golongan ini biasanya bersikap apatis terhadap realitas sosial-politik.
4. *Apatis.* Sikap acuh tak acuh, tak mau tahu tentang kondisi sosial dan politik dikampus.
5. *Humori.* Mahasiswa yang memanfaatkan waktunya sebagai masa liburan, mendapatkan kebebasan dari perhaian orang tua.
6. *Mahasiswa Religius*: Tipikal mahasiswa kemana-mana membawa Al-qur'an, berpakaian ala orang Arab, menjaga jarak dengan lawan jenis.

7. *Mahasiswa Santai Apa Adanya*: Tipikal mahasiswa yang tidak banyak berpikir, menjalani kehidupan apa adanya, tidak banyak memikirkan kuliah.
8. *Mahasiswa Romantis.* Tipikal mahasiswa mencari cinta atau pasangan sebagai objek untuk memadukan antar perasaan dan hati.

C. Mahasiswa dan Organisasi

Seakan dua kata tersebut tidak dapat dipisahkan, karena dengan organisasi inilah mahasiswa dapat mengembangkan diri dalam wawasan, dan potesi yang dimilkinya.Tapi hal itu tidak disadari oleh setiap mahasiswa, sebagian lain –justru dalam golongan yang lebih besar- organisasi dijadikan "momok" atau penghambat dalam akademiknya. Kebanyakan mereka berpendapat bahwa dengan ikut berorganisasi akan menjadikan nilai anjlok, prestasi buruk, juga menyita banyak waktu, biaya dan tenaga. Tetapui sedikit sekali yang berfikir tentang dampak positif yang nantinya menjadi bekal kelak kembali ke masyarakat.

Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang yang terdiri dari enam fakultas, tujuh belas jurusan, dan satu prodi dengan cirri dan karakter yang berebeda ternyata sangat berpengaruh pada cara berpikir mahasiswa dalam menilai suatu masalah.

Pada kampus ini organisasai bisa dibedakan menjadi dua, yaitu organisasi intra kampus (OMIK) dan organisasi ekstra kampus (OMEK). Organisasi intra kampus adalah organisasi yang secara administrative dan struktural berhubungan dengan kampus, sedangkan organisasi ekstra kampus adalah organisasi independen yang baik struktur dan administrasinya lepas dari manapun serta mempunyai aturan–aturan secara mandiri, dan lepas dari pengawasan manapun. Sehingga organ ini lebih berani menyuarakan aspirasi secara lantang.

Organisasi intra kampus (OMIK) bisa dikategorikan menjadi tiga. Yang pertama adalah OMIK dibawah naungan Republik Mahasiswa (RM), seperti SEMA-U, DEMA-U, SEMA-F, DEMA-F, HMJ dan HIMAPRODI. Organisasi ini menyerupai miniatur Negara dengan tujuan adalah 1).Terbinanya intelektualitas, spritualitas, profesionalisme dan minat dan bakat mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2).Terlaksananya TRI Darma Perguruan Tinggi secara terarah dan terpadu, 3).Terjalinnya kerjasama dan berkembangnya daya, cipta, rasa, dan karsa mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 4).Memibina dan mengembangkan potensi mahasiwa di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 5).Terbentuknya integritas keperibadian, kegotong royongan dan kebersamaan sebagai bangsa Indonesia dilingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (AD RM Pasal 7). Yang kedua adalah

UKM, sebelum tahun 2012 UKM masih dibawah naungan RM, namun pada MUSMA 2012 UKM menyatakan lembaga otonom diluar RM yang bertujuan sebagai wadah pengembangan kegiatan, minat, bakat, dan ketrampilan mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim. Dan yang ketiga adalah JDFI dan HTQ, organisasi ini merupakan organisasi yang langsung dibawah rektor. Sebenarnya organisasi ini masih menjadi perdebatan oleh beberapa kalangan karena sifat istimewanya.

Organisasi ekstra kampus (OMEK) secara umum mempunyai tujuan memberikan wadah bagi mahasiswa untuk bersikap dan bertindak dalam menanggapi masalah-masalah yang bersifat sosial kemasyarakatan baik dalam lingkup regional maupun nasional dan tidak terikat dengan organ-organ lain baik bersifat sosial politik maupun kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak struktural kampus. Di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sendiri ada beberapa organisasi ekstra kampus yang mewarnainya. Diantaranya adalah PMII, HMI, IMM, KAMMI, GMNI, KOMA, dll.

D. PMII Harus ke Kampus

PMII merupakan organisasi ekstra terbesar di UIN maulana Malik Ibrahim Malang. Namun hal ini menjadi suatu ironi melihat banyaknya kader yang berada pada zona nyaman dan tak mampu bersikap kritis lagi. Seharusnya sudah tugas PMII mencerdaskan kehidupan mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, sehingga mampu berpikir kritis terhadap realita sosial yang ada.

Melihat kondisi dunia mahasiswa hari ini, PMII harus lebih matang dalam mengembangkan visi dan misinya. PMII harus bisa menjadi organisasi "gaul" yang sesuai dengan tuntutan jaman, tentunya tanpa meninggalkan budaya-budaya PMII yang ada. PMII dituntut tetap menarik ditengah ababilnya mahasiswa-mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Diakui atau tidak, saat ini PMII adalah penguasa Republik Mahasiswa (RM) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (semoga selamanya,amiin). Banyak kader PMII yang menjadi pimpinan pada organisasi di bawah naungan RM tersebut, dan ada beberapa yang menjadi pimpinan dalam UKM. Ini berarti tugas dari sahabat-sahabat PMII bisa dikatakan berat, karena selain harus menjalankan roda organisasi di PMII juga di intranya. Namun ingat sahabat, bahwa kita terjun dalam perpolitikan intra bukan semata-mata hanya mencari materi ataupun eksistensi saja. Lewat intralah pintu awal kaderisasi kita, lewat intralah kita mampu mengkritisi langsung kebijakan kampus, dan masih banyak hal-hal lainnya.

Oleh karena itu kader-kader PMII harus mampu mempersiapkan diri sebaik mungkin baik dari segi kapasitas keilmuan maupun kecakapan managerial dalam organisasi. Sehingga nantinya ketika masuk dunia organisasi intra sudah

matang dan siap tempur, hal ini wajib dipenuhi karena hal tersebut adalah tanggung jawab sebagai kader PMII.

Hal lain yang perlu dicermati oleh kader-kader PMII adalah, kader PMII yang berada di tataran intra kampus harus mampu dan bisa mengcounter setiap kebijakan-kebijakan yang ditelurkan oleh akademik yang itu tidak berpihak kepada kepentingan akademik mahasiswa. Sesunggungnya banyak sekali kebijakan-kebijakan kampus yang tidak berpihak kepada kepentingan secara akademis mahasiswa, contohkanlah pembangunan infrstruktur kampus secara berlebihan, dikekangnya mahasiswa untuk tidak ikut organisasi dan masih banyak lagi. Bila hegemoni sistem ini terus kita biarkan, bukan tidak mungkin peran-peran mahaiswa yang ada dikampus akan semakin redup dan lambat laun akan mati. Ironis memang ditengah budaya demokrasi yang di agung-agungkan mahasiswa malah ciut. Ini yang harus segera kita benahi.

PENGELOLAAN OPINI DAN GERAKAN MASSA

Oleh : Eko Yusuf Wahyudi

A. Pengertian

1. Opini Publik

   Seperti ilmu sosial lainnya, definisi opini (pendapat) sulit untuk dirumuskan secara lengkap dan utuh. Ada berbagai definisi yang muncul, tergantung dari sisi mana kita melihat. Ilmu komunikasi mendefinisikan opini sebagai pertukaran informasi yang membentuk sikap, menentukan isu dalam masyarakat dan dinyatakan secara terbuk. Ilmu psikologi mendefinisikan opini publik sebagai hasil dari sikap sekumpulan orang yang memperlihatkan reaksi yang sama terhadap rangsangan yang sama dari luar (Leonard W. Doob).

   Opini publik memiliki karakteristik sebagai berikut:

   a) Dibuat berdasarkan fakta, bukan kata-kata
   b) Dapat merupakan reaksi terhadap masalah tertentu, dan reaksi itu diungkapkan
   c) Masalah tersebut disepakati untuk dipecahkan
   d) Dapat dikombinasikan dengan kepentingan pribadi
   e) Yang menjadi opini publik hanya pendapat dari mayoritas anggota masyarakat
   f) Opini publik membuka kemungkinan adanya tanggapan
   g) Partisipasi anggota masyarakat sebatas kepentingan mereka, terutama yang terancam
   h) Memungkinkan adanya kontra-opini

2. Proses pembentukan opini publi

   Proses pembentukan opini publik melalui beberapa tahapan:

   a) Ada masalah yang perlu dipecahkan sehingga orang mencari alternatif pemecahan
   b) Munculnya beberapa alternatif memungkinkan terjadinya diskusi untuk memilih alternative
   c) Kesadaran kelompok
   d) Program yang memerlukan dukungan yang lebih luas

   Erikson, Lutberg dan Tedin mengemukakan ada empat tahap terbentuknya opini publik:

a) Munculnya isu yang dirasakan sangat relevan bagi kehidupan orang banyak
b) Isu tersebut relatif baru sehingga memunculkan kekaburan standar penilaian atau standar ganda
c) *opinion leaders* (tokoh pembentuk opini) yang juga tertarik dengan isu tersebut, seperti politisi atau akademisi
d) Mendapat perhatian Pers/ media hingga informasi dan reaksi terhadap isu tersebut diketahui khalayak

Opini publik sudah terbentuk jika pendapat yang semula dipertentangkan sudah tidak lagi dipersoalkan. Dalam hal ini tidak berarti bahwa opini publik tersebut merupakan hasil kesepakatan mutlak suara mayoritas setuju, karena kepada para anggota diskuis memang sama sekali tidak dimintakan pernyataan setuju. Opini publik terbentuk jika dala diskusi tidak ada lagi yang menentang pendapat akhir karena sudah berhasil diyakinkan atau meungkin karena argumentasi untuk menolak sudah habis.

Berdasarkan terbentuknya opini publik, kita mengenal opini publik yang murni. Opini publik murni adalah opini publik yang lahir dari reaksi masyarakat atas suatu masalah (isu). Sedangkan opini publik yang tidak murni dapat berupa:

a) *Manipulated Public Opinion,* yaitu opini publik yang dimanipulasikan atau dipermainkan dengan cerdik.
b) *Planned Public Opinion,* yaitu opini publik yang direncanakan
c) *Intended Public Opinion,* yaitu opini publik yang dikehendaki
d) *Programmed Public Opinion,* yaitu opini publik yang diprogramka
e) *Desired Public Opinion,* yaitu opini publik yang diinginkan

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi opini publik

Opini publik dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya:

a) Pendidikan: Pendidikan, baik formal maupun non formal, banyak mempengaruhi dan membentuk persepsi seseorang. Orang berpendidikan cukup, memiliki sikap yang lebih mandiri ketimbang kelompok yang kurang berpendidikan. Yang terakhir cenderung mengikut.
b) Kondisi Sosial: Masyarakat yang terdiri dari kelompok tertutup akan memiliki pendapat yang lebih sempit daripada kelompok masyarakat terbuka. Dalam masyarakat tertutup, komunikasi dengan luar sulit dilakukan.
c) Kondisi Ekonomi: Masyarakat yang kebutuhan minimumnya terpenuhi dan masalah survive bukan lagi merupakan bahaya yang mengancam, adalah masyarakat yang tenang dan demokratis.

d) Ideologi: Ideologi adalah hasil kristalisasi nilai yang ada dalam masyarakat, ia merupakan pemikiran khas suatu kelompok. Karena titik tolaknya adalah kepentingan ego, maka ideologi cenderung mengarah pada egoisme atau kelompokisme.
e) Organisasi: Dalam organisasi, orang berinteraksi dengan orang lain dengan berbagai ragam kepentingan. Dalam organisasi, orang dapat menyalurkan pendapat dan keinginannya. Karena dalam kelompok ini orang cenderung bersedia menyamakan pendapatnya, maka pendapat umum mudah terbentuk.
f) Media Massa: Persepsi masyarakat dapat dibentuk oleh media massa. Media massa dapat membentuk pendapat umum dengan cara pemberitaan yang sensasional dan berkesinambungan.

B. Pengelolaan Opini dalam Gerakan Massa

"Mengelola Opini untuk Menggerakkan Massa" merupakan skill yang mesti dimiliki orang sebagai sebuah ketrampilan memimpin. Generasi muda sebagai agen sekaligus mandataris perubahan dimasa depan harus cakap dalam mengorganisir ide perubahan sebelum dilempar kepada masyarakat. Untuk itu, mahasiswa berpotensi menjadi *opinion maker* dalam menyuarakan perubahan.

Dalam kehidupan sehari-hari, kerap kali kita terlibat dalam penggalangan dukungan untuk mencapai tujuan, mulai dari hal yang sederhana sampai masalah yang lebih besar dan strategis. Misalnya, dengan alasan agar cepat sampai sekolah kita berusaha meyakinkan orang tua agar mau dibelikan sepeda motor, mulai dari untung dan ruginya memiliki sepeda – coba kita utarakan dengan orang tua. Nah, segala usaha dan upaya meyakinkan kedua orang tua itu bisa dikatakan gerakan mengelola opini anggota keluarga agar tujuan untuk memiliki sepeda motor terpenuhi. Jadi menurut saya, pengertian pengelolaan opini bukan sebatas membuat opini lalu dikirim ke media massa, tapi penggalangan massa demi mencapai tujuan tertentu. Sedangkan cara dan bentuknya bisa bermacam-macam.

Pengelolaan opini sebagai sebuah gerakan setidaknya ada tiga agenda yang mesti kita kerjakan terlebih dahulu. Ketiga agenda itu bisa dijadikan acuan tergantung tingkat kesulitan gerakan yang dibangun;

1. Tentukan Tujuan Gerak : Sebelum melontarkan ide atau opini kepada publik secara luas, terlebih dahulu tujuan gerakan harus ditetapkan secara tepat. Disini misi gerakan harus menjadi "Panglima" yang akan menjadi petunjuk arah. Namun pengalaman selama ini kenapa gerakan massa "Layu" ditengah jalan? Persoalannya penggerak opini terbuai dengan imbalan-imbalan

pragmatis yang ditemui ditengah jalan. Akibatnya, ia lupa akan tujuan gerakan.

2. Pegang Data dan Fakta: Bagi seorang organizer, data adalah senjata yang paling ampuh. Dengan data dan fakta yang lengkap serta akurat kelompok target gerakan akan sulit membantah kebenaran yang kita sampaikan. Apa lagi itu bentuknya penyelewengan atau manipulasi. Inilah yang banyak dilakukan oleh banyak aktivis dalam menjalankan programnya.
3. Gali Masalah: Berbekal data yang akurat dengan sedikit analisa saja kita sudah mengetahui pangkal masalahnya, kemudian dampaknya seperti apa. Bisa menimpa siapa saja dan lain seterusnya. Kalau sudah akar masalah dan dampaknya tergali, baru tawarkan solusi penyelesaian dari problem sosial yang terjadi. Analisa yang cerdas akan menghasilkan jawaban yang cerdas pula.

Dalam mengelola opini menjadi sebuah gerakan, kita bisa belajar dari kesuksesan aktivis gerakan pada era ’66, ’74 maupun reformasi ‘98. Kita bisa lihat berbagai wacana yang disampaikan itu ternyata selalu disuarakan ketika momentum datang. Selain bekerja dengan rencana, mereka juga tidak pernah melewatkan momentum dalam menyuarakan perubahan. Hasilnya mereka terlatih membaca momentum.

Yang tidak kalah penting ketika mengelola opini menjadi gerakan adalah berkongsi dengan media massa. Demi misi gerakan, “konspirasi” dengan media perlu dibangun. Bukankah media membutuhkan berita yang berasal dari masyarakat. Jika yang disampaikan itu benar dan menyangkut kepentingan publik luas maka tidak ada alasan bagi media untuk memberitakan apa yang ingin kita suarakan. Untuk membangun “konspirasi” dengan media, bisa dengan mengadakan jumpa pers, seminar, lokakarya, demonstrasi atau menulis opini dan artikel dimedia massa. Cara-cara ini malah sangat efektif mengundang media agar mau memberitakan gerakan yang akan kita bangun.

Selanjutnya tokoh masyarakat juga perlu kita rangkul, karena bagaimanapun realitas masyarakat di Indonesia masih sangat mempercayai dan bergantung pada tokoh. Selain akan menjadi penggerak utama, mereka bisa dimanfaatkan sebagai “bemper” jika gerakan mendapat pertentangan dari penguasa atau kelompok tertentu yang merasa terusik. Dengan pengaruh yang mereka miliki tentunya kelompok penentang akan berpikir sekian kali jika ingin mengganggu.

Layaknya kita sebagai generasi yang mewakili kelompok intelektual sudah saatnya tampil sebagai *opinion maker* bukan lagi menjadi komoditas yang terjebak pada lingkar opini yang kemudian menyeret kita kedalam gerakan praktis dan reaktif belaka. Bagaimanapun juga tidak akan ada api kalau tidak ada

pemantiknya, Bola yang dilempar akan memantul sebanding dengan seberapa kuat lemparannya (*Teori Newton II*). Tidak akan terwujud suatu gerakan massif dan tertata rapi tanpa kita menangkap dan melemparkan opini secara terus-menerus.

C. Peran PMII dalam Instrumen Kebijakan Pengelolan Opini Publik, Komunikasi Media, dan Transformasi Sosial

Berangkat dari kesadaran akan peran dan tanggung jawabnya sebagai bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta perubahan pesat tatanan dunia baru, PMII perlu menyusun strategi pengelolaan opini publik. Sebab, transformasi nilai dan wacana adalah bagian prasyarat mutlak dalam mengupayaan perubahan kehidupan manusia secara umum dan lebih khusus lagi kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik.

Dalam mengupayakan tranformasi nilai dan menguatkan pengaruhnya terhadap masyarakat, perlu ada sandaran pendukung yang memadai. Sosialisasi program dan kebijakan organisasi penting untuk menetaskan wacana agar tersebar dan berkembang ke ranah publik. Tanpa adanya sosialisasi, segala potensi, kekuatan, dan produk apapun dari suatu institusi ataupun organisasi tidak akan mampu mengalir dan tertransformasi dengan baik.

Tentang sosialisasi dan pengelolaan opini publik, membutuhkan sejumlah perangkat. Antara lain;

- Tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang memadai dan berkualitas. Dalam perspektif sosiologis, gambaran anggota PMII bisa dilihat dari dua hal: anggota yang secara tradisi, kultur, dan ritualnya kental dengan nilai-nilai yang dikembangkan oleh Nahdlatul Ulama dan anggota yang secara tradisi, kultur, dan ritualnya kurang atau malah sama sekali tidak bersentuhan dengan nilai yang dikembangkan oleh Nahdlatul Ulama. Dalam perspektif pendidikan terbelah menjadi dua hal: anggota PMII yang pendidikannya berada di lingkungan pesantren dengan basis keagamaan kuat dan anggota yang mengenyam pendidikan institusi pembelajaran umum. Anggota PMII yang dominan adalah disiplin ilmu sosial. Sedangkan anggota yang memiliki basis keilmuan eksakta masih minim

  Dalam konteks ini, suatu organisasi yang berkeinginan mensosialisasikan ide dan kebijakannya membutuhkan struktur atau institusi yang kuat dan sistem yang berjalan baik. Menafikan semua itu akan berakibat pada mampatnya sosialisasi dan transformasi ide.
- Struktur yang kuat. Struktur adalah jaringan tatanan, hubungan-hubungan yang sifatnya vertikal dan horizontal. Dalam kerangka

berorganisasi, struktur mutlak diperlukan. Tetapi, struktur itu tidak adalah berjalan jika tidak ada bangunan sistem yang baik. Struktur adalah sistem dalam keadaan diam, sedangkan sistem adalah struktur yang bekerja. Organisasi tidak akan berjalan tanpa adanya struktur. Struktur tidak akan bekerja jika tidak ditopang dengan sistem dan mekanisme yang bergerak dinamis

- Strategi dan taktik. Strategi dan taktik harus dimiliki oleh suatu organisasi agar sosialisasi dan transformasi yang dilakukan bisa mengena pada sasaran. Strategi adalah cara yang harus dilakukan untuk memobilisasi kekuatan (forces mobilization). Forces mobilization hanya akan optimal jika memiliki titik fokus. Fokus akan digunakan untuk core competence. Core competence digunakan untuk menjadi pemenang (winner). Strategi lebih dimaknai sebagai kerangka konsepsional. Sedangkan taktik berkaitan langsung dengan praksis lapangan.

Dari ketiga hal tersebut, perlu juga dipertimbangkan tiga aspek penting. Yakni lingkungan (environment). Desain produk yang dimiliki (pilihan gerakan) PMII perlu mempertimbangkan perubahan-perubahan yang terjadi dalam lingkungan sosial di sekitarnya. Kedua, misi. Misi berkaitan dengan isu atau masalah yang akan disampaikan. Ketiga, kompetisi. Kompetisi adalah mekanisme perebutan area gerakan untuk mempertaruhkan produk-produk atau ide-ide yang dihasilkan sebuah organisasi. Respon publik atas ide yang disampaikan akan menentukan seberapa besar keberhasilan proses transformasi yang dilakukan.

Semua itu membutuhkan rekayasa untuk mencapainya. Keberhasilan dalam melakukan transformasi dan pengelolaan opini publik, hanya bisa dilakukan jika ruler of life terbangun dengan baik menyangkut visi, misi, orientasi, kualitas SDM, keberadaan struktur dan sistemnya, serta dukungan strategi dan taktik yang memadai.

Dalam Ilmu Komunikasi, opini dipahami sebagai proses pertukaran informasi yang dinyatakan secara terbuka dan dapat membentuk sikap, perilaku, dan cara pandang manusia. Opini juga dimaknai sebagai komunikasi tentang soal-soal tertentu yang jika dibawakan dalam bentuk atau cara tertentu kepada orang tertentu akan membawa efek tertentu pula. Sedangkan Opini publik adalah sikap sekumpulan orang atau komunitas yang menunjukkan reaksi yang sama terhadap rangsangan yang sama pula dari luar.

Dari perspektif ini, pengelolaan opini publik menjadi bagian dari strategi penting bagi PMII yang memiliki tanggung jawab dalam melakukan transformasi sosial serta mensosialisasikan ide-ide dan produk-produk hukum yang dihasilkan.

Pada sisi lain, media memiliki peran penting di alam demokrasi. Ia disebut-sebut sebagai pilar ke empat demokrasi (the fourth estate of democracy) setelah eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Aksioma tersebut memang belum tentu benar, bahkan ada yang menganggapnya sebagai sebuah mitos belaka. Tetapi, setidaknya, anggapan umum masyarakat membenarkan bahwa media sering terlibat dalam fase tertentu perubahan sosial-politik suatu bangsa.

Media massa, apapun bentuknya, dianggap sebagai area pergulatan, perdebatan, dan saling mempengaruhi antara kekuatan sosial politik masyarakat. Ia menjadi 'padang karbala' pertempuran ideologi dan sistem nilai yang dianut-yakini berbagai kelompok. Pada titik tertentu, media memposisikan dirinya (atau diposisikan) sebagai pasar bebas ide (free market ideas). Berbagai ideologi, kepentingan, penguasa ataupun kelompok yang resisten terhadap penguasa, saling berebut pengaruh.

Sebagai pasar bebas ide dan area saling mempengaruhi antara kelompok kepentingan di masyarakat, media dengan sendirinya bias. Ia punya kecenderungan untuk mendua. Kadangkala, media berpihak terhadap penguasa atau kelompok dominan, dan menjadi alat kontrol terhadap wacana publik. Tetapi tidak jarang pula, media menampilkan wajah garangnya di depan penguasa, mengkritisi, bahkan menjadi alat perjuangan bagi kelompok marjinal dan terpinggirkan.

Sebagai representasi dari salah satu kekuatan sosial-politik mahasiswa (dan pemuda) sepatutnya PMII memahami kecenderungan bias media. Itu penting agar organisasi ini bisa selalu menempatkan diri dan bersikap dalam setiap momen kesejarahan Bangsa Indonesia. Pun, peran penting media dalam membangun demokrasi tak boleh dilupakan.

Sebab, PMII sudah memaklumatkan dirinya sebagai organisasi yang concern terhadap demokrasi.PMII juga tidak boleh abai terhadap perkembangan pesat media massa kontemporer. Publik kini tidak hanya mengkonsumsi informasi dari media massa konvensional. Dengan keberadaan teknologi informasi, melejitnya industri media (dot) com, blogging, dan jurnalisme warga (*citizen journalism*), masyarakat memiliki banyak alternatif sumber informasi di luar media mainstream. Sebagai kelompok terdidik, PMII selayaknya memanfaatkan betul pesatnya pertumbuhan teknologi informasi menjadi media komunikasi antar kader maupun pencitraan organisasi secara eksternal.

Menjelang usia setengah abad, PMII hadir di era ketika perkembangan media dan teknologi informasi begitu pesat. Semua itu perlu disikapi dengan pengelolaan opini publik yang terencana dan bisa menjawab perubahan zaman. Ritme zaman sudah berubah, dan PMII harus bisa seiring dengan ritme tersebut, bahkan melampauinya. Hanya dengan itu, PMII tidak tergerus zaman dan kehilangan perannya.

Namun, pola pengelolaan opini publik 'konvensional' juga tidak bisa diabaikan. Forum-forum seminar, pelatihan, majelis taklim, halaqoh di Masjid, Musholla, ataupun tempat ibadah lainnya harus menjadi medan pewacanaan ide dan transformasi sosial. Media seperti itu sangat efektif, murah, dan mudah diterima karena masyarakat Indonesia dikenal memiliki regiusitas cukup tinggi meski pada titik tertentu pemahaman keagamaannya masih dangkal.

Kunci sukses transformasi sosial dan distribusi ide adalah jika produk-produk organisasi dapat diterima masyarakat secara efektif, cepat, dan murah biaya. Perimbanganan dalam mengelola opini publik melalui media mutakhir dan konvensional berpotensi menuai hasil yang lebih baik.

PMII, Negara dan Globalisasi

Menjaga independensi organisasi adalah sikap yang tidak bisa ditawar, terlebih saat berhadap dengan Negara. Dengan nalar independensinya serta kesadaran paradigmatik untuk selalu kritis, PMII selalu menjaga jarak dengan Negara. Sikap seperti itu membuat PMII mendapat label sebagai organisasi protes.

Sebagai sebuah sikap organisasi, menjaga jarak dengan Negara harus tetap terjaga. Namun, tanggung jawab sosial untuk terus melakukan transformasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang pro-rakyat, PMII perlu membentuk jejaring distribusi kader. Sebagai bagian dari kader bangsa, heteregonitas pola distribusi kader dibutuhkan, termasuk melihat potensi pola di posisi strategis bangsa. Membangun jejaring organisasi dengan semua *stake-holder* bangsa perlu menjadi bagian dari strategi organisasi. Perimbangan antara aktivitas kultural dan struktural menjadi penting agar PMII mampu mengoptimalkan perannya sebagai organisasi kader bangsa.

Kencangnya arus globalisasi, dunia yang terlihat semakin datar, dan pola distribusi informasi yang kian cepat, menuntut penyikapan khusus bagi PMII. 'Think globally act locally', adagium lawas seperti ini menjadi relevan bagi PMII dalam merespon perubahan tata kelola dunia baru.

Sebagai organisasi yang lahir dan besar dalam akar kesejarahan Bangsa Indonesia, PMII tidak boleh abai terhadap kearifan-kearifan lokal yang dimilikinya. Namun, respon atas arus globalisasi tidak terelakkan agar PMII tetap eksis sebagai sebuah organisasi modern yang memiliki kekuatan kultural. Penguatan jejaring internasional, membangun komunikasi lintas Negara dengan sesama organisasi mahasiswa dan kepemudaan, maupun eleman civil society lainnya mutlak diperlukan. Langkah tersebut untuk menghindari agar organisasi ini tidak hanya menjadi besar di Negara sendiri, tetapi menjadi kekuatan masyarakat sipil yang diperhitungkan oleh komunitas global.

MANAJEMEN AKSI

Oleh: Yatimul ainun

I. PENGERTIAN MANAJEMEN AKSI

Manajemen Secara umum Manajemen memiliki pengertian pengelola potensi atau isi di dalam sebuah wadah atau komunitas. Sedangkan aksi berasal dari kata "Action" yang bermakna " Gerak", Gerakan adalah berpindahnya energi, volume, tempat dan waktu dari kondisi semula menuju kondisi kemudian. Aksi di dalam dunia organisasi pergerakan dapat diterjemahkan sebagaisegala pikiran dan perbuatan/tindakan yang mengarah pada capaian-capaian terhadap tujuan perjuangan itu sendiri.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa manajemen aksi merupakan suatu cara yang digunakan untuk mengatur suatu massa aksi agar tetap terkoordinir dan sesuai dengan rencana dan target awal hingga mencapai hasil yang diinginkan.

Aksi umumnya dilatarbelakangi oleh matinya jalur penyampaian aspirasi atau buntunya metode dialog.. Dalam trias politika, aspirasi rakyat diwakili oleh anggota legislatif. Namun dalam kondisi pemerintahan yang korup, para legislator tak dapat memainkan perannya, sehingga rakyat langsung mengambil 'jalan pintas' dalam bentuk aksi. Aksi juga dilakukan dalam rangka pembentukan opini atau mencari dukungan publik. Dengan demikian isu yang digulirkan harapannya dapat menjadi snowball.

Salah satu bentuk penyampaian aspirasi kepada pemerintah serta penyampaian pesan kepada masyarakat adalah dengan melakukan aksi massa. Dalam negara yang berdemokrasi, aksi menjadi cara yang dilegalkan, oleh karena itu lembaga pendidikan seperti universitas juga harus berperan sebagai guardian of value dari pemerintah serta masyarakat. Mengapa cara yang dipilih adalah aksi ? karena aksi berdampak pada dua sisi, yakni sisi ketersampaian pesan kepada pihak yang diinginkan serta penyadaran masyarakat atas sebuah isu. Sehingga aksi masih menjadi cara yang relevan untuk dilakukan.

II. ATURAN HUKUM

Undang-undang NO. 9 TAHUN 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Beberapa hal; penting dalam undang-undang ini :

- Penyampaian pendapat dimuka umum tidak boleh dilaksanakan ditempat tertentu, antara lain Istana Presiden (Radius 100m), tempat ibadah (Radius 150 m), Instalasi militer dan obyek vital nasional (Radius 500 m) dari pagar luar.
- Dilarang membawa benda-benda yang membahayakan keselamatan umum (Sajam, Molotov, dll)

- Menyampaikan laporan atau pemberitahuan tertulis kepada pihak kepolisian setempat
- Surat pemberitahuan memuat tentang tujuan dan maksud aksi, waktu dan acara, rute, jumlah massa, penanggung jawab aksi dimana dalam UU ini 100 massa 1 orang penanggung jawab.

III. BENTUK DAN SUSUNAN MASSA AKSI

Bentuk Aksi seperti Aksi Demonstrasi, Aksi Mogok makan, Aksi Damai, Aksi Mimbar bebas, Aksi Theatrikal, dll

IV. TAHAPAN AKSI

Dalam melaksanakan aksi, harus mempertimbangkan beberapa hal penting. baik perangkat yang mesti dipersiapkan maupun tahapan-tahapan yang harus dilalui bersama. Aksi memiliki beberapa tahapan yang harus dilalui, antar lain:

A. Pra Aksi

1. Persiapan dan pematangan issue
2. Menyusun Tim Aksi

Perangkat aksi adalah bagian kerja partisipan massa aksi. Perangkat massa aksi disesuaikan dengan kebutuhan, biasanya diperlukan perangkat sebagai berikut:

a) Koordinator lapangan: Korlap bertugas memimpin aksi di lapangan, berhak memberikan instruksi kepada peserta aksi/massa. Keputusan untuk memulai ataupun membubarkan /mengakhiri massa aksi ditentukan oleh korlap.
b) Orator: Orator adalah orang yang bertugas menyampaikan tuntutan-tuntutan massa aksi dalam bahasa orasi, serta menjadi agitator yang membakar semangat massa.
c) Humas: Perangkat aksi yang bertugas menyebarkan seluas-luasnya perihal massa aksi kepada pihak-pihak berkepentingan, terutama pers.
d) Negosiator: Negosiator berfungsi sesuai dengan target dan sasaran aksi. Misalnya pendudukan gedung DPR/DPRD sementara target tersebut tidak dapat tercapai karena dihalangi aparat keamanan, maka negosiator dapat mendatangi komandannya dan melakukan negosiasi agar target aksi dapat tercapai. Karenanya seorang negosiator hendaknya memiliki kemampuan diplomasi.
    1. Kurir (menjembatani komunikasi antara massa aksi dengan massa aksi lain)

2. Advokasi (memberi perlindungan hukum)
3. Asisten teritorial/keamanan/sweaper/dinamisator lapangan/ intelejen
4. Logistic dan medical rescue.
5. Dokumentasi
6. Tim kreatif
7. Membuat press release (Berisikan pesan dan tuntutan dari isu yang telah dibahas)
8. Mengumpulkan massa (estimasi)
9. Menghubungi media
10. Mempersiapkan perangkat / kelengkapan aksi (spanduk, bendera, press release,perangkat dokumentasi, poster, , pengeras suara seperti TOA dan mobil sound system, dan identitas peserta aksi, dan failitas teatrical.)
    a. Skenario dan pembagian peran
    b. Menghubungi pihak kepolisian untuk perizinan

B. Aksi

Dalam tahapan inilah peran, fungsi dari perangkat aksi diaplikasikan sesuai dengan tugas masing-masing, komunikasi serta koordinasi antar perangkat aksi tidak boleh terputus karena perubahan situasi di lapangan sangatlah cepat, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan dalam suatu aksi dapat dihindari, misalnya : Provokasi, Infiltran, Represif aparat, Chaos.

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan aksi yakni :

1. Membagikan pesan yang telah dibuat, seperti pamflet dan leaflet.
2. Berorasi dalam perjalanan dan di tempat tujuan akhir, orasi adalah bagian dari penyampaian pesan aksi kepada masyarakat luas.
3. Yel-yel dan menyanyikan lagu. Sebagai penyemangat massa aksi dan mendominasi/ menguasai suasana/ keadaan (situasi dan kondisi).
4. Audiensi ke pihak yang dituju, dilakukan oleh perangkat aksi yang telah ditunjuk, negosiator maupun yang jago dalam beraudiensi.
5. Pembacaan press release. Hal ini biasanya dilakukan pada akhir aksi dan diharapkan dapat diliput media agar pesan yang kita bawa dapat tersampaikan kepada khalayak luas.

C. Pasca Aksi

- Absensi, sebagai pemastian terhadap jumlah peserta aksi yang terlibat selama pelaksanan aksi.
- Evaluasi, untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dari aksi

- Rekomendasi, dari hasil-hasil yang telah dicapai melalui aksi dapat dikerangkakan menjadi sebuah masukan untuk gerakan yang akan dilaksanakan selanjutnya.

Peranan kelembagaan organisasi di lingkungan yang dihadapi menjadi mutlak untuk dipersiapkan. Pikiran tanpa praktek hanya akan melahirkan mimpi saja, sedangkan praktek tindakan tanpa pikiran hanya akan melahirkan ugal-ugalan atau anarki gerakan sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Bung Karno bahwa gerakan harus Massa Aksi (Massa yang sadar akan pikiran dan perbuatannya) bukan Aksi Massa (Aksi yang gemerlap tampilannya saja atau hanya ikut-ikutan). Program perjuangan organisasi pergerakan yang dipraktekkan dalam Manajemen Aksi dan Propaganda harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

Identitas Narasumber

Nama Narasumber : _____

Nomor HP : _____

Lainnya : _____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Malang .... , Mei 2016

TTD

_____

Narasumber

Identitas Narasumber

Nama Narasumber : _____

Nomor HP : _____

Lainnya : _____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Malang .... , Mei 2016

TTD

_____

Narasumber

Identitas Narasumber

Nama Narasumber : _____

Nomor HP : _____

Lainnya : _____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Malang .... , Mei 2016

TTD

_____

Narasumber

Identitas Narasumber

Nama Narasumber : _____

Nomor HP : _____

Lainnya : _____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Malang .... , Mei 2016

TTD

_____

Narasumber

Identitas Narasumber

Nama Narasumber : _____

Nomor HP : _____

Lainnya : _____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Malang .... , Mei 2016

TTD

_____

Narasumber

Identitas Narasumber

Nama Narasumber : _____

Nomor HP : _____

Lainnya : _____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Malang .... , Mei 2016

TTD

_____

Narasumber

Identitas Narasumber

Nama Narasumber : _____

Nomor HP : _____

Lainnya : _____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Malang .... , Mei 2016

TTD

_____

Narasumber

Identitas Narasumber

Nama Narasumber : _____

Nomor HP : _____

Lainnya : _____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Malang .... , Mei 2016

TTD

_____

Narasumber

Identitas Narasumber

Nama Narasumber : _____

Nomor HP : _____

Lainnya : _____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Malang .... , Mei 2016

TTD

_____

Narasumber

B I O D A T A P E S E R T A

NAMA : _____

TTL : _____

Nomor HP : _____

Media Sosial : _____

_____

_____

Riwayat Pendidikan

SD Sederajat : _____

SMP Sederajat: _____

SMA : _____

Riwayat Organisasi

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

Motivasi Mengikuti PKD :

_____

_____

_____

_____

TTD Peserta PKD

_____

(.....)

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA
PELATIHAN KADER DASAR (PKD)
KOMISARIAT PMII AL-QOLAM
Masa Khidmat 2015-2016

Penanggung Jawab (PJ)
Ketua Komisariat PMII Al-Qolam **:** Aminulloh

Panitia Sttering Committee (SC)
Ketua : Abdurrohman
Sekretaris : Abdus Shomad
Anggota **:** M. Yusron

Panitia Organizing Committe (OC)
Ketua : Badrud Tammam
Sekretaris : Winda Huda P
Bendahara **:** Imammatus Sholihah

Seksi-seksi

Fasilitator	Pub-Dek-Dok	Perlengkapan
1. M.Yusuf R 2. Siti Thoyyibah 3. M.Hamimulloh 4. Ahmad Ruji	1. Mubtada Nilangga 2. Ahmad Yuski 3. Zainur Rozikin 4. Fahmi R 5. Mahfud 6. Holifah 7. Dila 8. Wadudulloh	1. Musafa 2. Uswatul H 3. Hamzah 4. Faqih 5. Shodikin 6. Syaiful Anwar 7. Tobir 8. Fatimatul Ula
Konsumsi	**Humas**	**Keamanan**
1. Siti Aminah 2. Isa Maulana 3. Nur Jazilah 4. Ika Silviani 5. Samuri 6. Muhklis 7. Khoirul Roziqin 8. Anis Laila 9. Adiba	1. Hambali 2. Syamsudin 3. Sukron 4. Nizar Z 5. Buchori 6. A.Sodiqin 7. Mualim 8. Fendi Ananta 9. Syamsuddin	1. Yuski 2. Sudirman 3. Alfian 4. Holil 5. Jamaluddin 6. Syifa'u Romli 7. Fery Iskandar 8. Heny Syafitri 9. Ansori

N U
Nahdlatul Ulama

BAB IV Pasal 4 Tujuan

Terbentuknya pribadi muslim Indonesia yang bertaqwa kepada Allah SWT, berbudi luhur, berilmu, cakap dan bertanggung jawab dalam mengamalkan ilmunya dan komitmen memperjuangkan cita-cita kemerdekaan Indonesia.

komisariatpmiialqolam@gmail.com

pkpmiialqolam.blogspot.com